



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

# **AUDIT OPERASIONAL ATAS PENGELOLAAN PROGRAM TANGGAP BENCANA GEMPA TAHUN 2009 DI PADANG PARIAMAN PADA PKPU CABANG PADANG**

**SKRIPSI**



**WIDYA NANDA  
06 153 069**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2011**

## **OPERATIONAL AUDITING OF DISASTER PROGRAM IN 2009 AT PADANG PARIAMAN BY PKPU PADANG**

There are so many disaster in Indonesia, it influences growing of social organization such as PKPU. Loyalty is the priority of this organization. So it needs some tools to control the effectiveness of the organization.

This research is qualitative type with case study in Padang Pariaman's earthquake in 2009. It was doing from 30 November until 4 March with analyzing standard of procedure operational, program and realization of program. There are 3 audit procedures that used in this: planning, actuating, and recommending.

There many result audit, (1) PKPU branch of Padang does not have their own standard of procedure operational for national disaster. (2) PKPU does not have enough human on Pemberdayaan division, therefore it is the most responsibility unit with disaster program and other program. (3) PKPU does not have rescue team. (4) finance division, that had done all their jobs, was good, it recorded all of donation in one account.

Researcher recommended to PKPU: (1) exactly, PKPU make written procedure, (2) it make rescue team which is permanent (3) add personal in Pemberdayaan division (4) write all of evaluation.

**Key words : Operational Auditing, Rescue Program**



## KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT pemilik segala kekuasaan dan kekayaan alam semesta dan seluruh isinya. Syukur padaMu Ya Rabb, atas segala nikmat kesehatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dan alhamdulillah atas nikmat hidayahMu. Shalawat dan salam untuk Rasulullah SAW. Sungguh telah banyak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, hingga sudah semestinya penulis berterima kasih, semoga balasan kebaikan senantiasa diberikan Allah SWT kepada :

1. Orang tua penulis tercinta. Terima kasih atas setiap untaian do'a dan kesabarannya. Semoga Allah SWT berikan Apa kesehatan dan kuat menjalankan aktivitas dan untuk ibundaku tercinta, terima kasih atas segala kesabaran dan kasih sayangnya.
2. Terima kasih kepada Prof.Dr.H.Syafrudin Karimi,SE, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi, dan juga kepada bapak Dr.H.Yuskar,SE,MA,Ak selaku ketua jurusan akuntansi.
3. Ibu Nini Sofriyeni, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dengan sabar menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga kepada ibu Sri Daryanti Zein dan ibu Riza Reni Yenti selaku penguji yang telah memberikan banyak masukan demi perbaikan skripsi ini.
4. Pimpinan PKPU cabang Padang yang telah bersedia memberikan informasi dan data yang penulis butuhkan, special kepada Pak Dedi, kak Oja dan Ni Leni.
5. Keluarga besar penulis, untuk Teta, Onang, Uni, Abang dan Uda, terima kasih atas segala kebersamaan dan nuansa keluarga yang tak pernah tergantikan oleh saudara manapun. Untuk mujahid dan mujahidahku, Fatia, Farhan, Faiz, Zakiyah dan Fatur, semoga jadi anak-anak yang sholeh dan sholehah.
6. Tim spiritual penulis, kepada Murabbiah penulis yang senantiasa memberikan motivasi dan ilmu. Terima kasih pada teman-teman, uni dan

kakak semua, semoga kita senantiasa bersemangat meraih cita-cita. Juga kepada adik-adikku semoga senantiasa istiqomah.

7. Teman-teman akuntansi 06, kepada kak fie, kak fika, ami, kak na, dewi, ira dan wen, terima kasih atas pertemanan yang dahsyat ini, dan Dila teman dalam suka dan duka, mulai dari persiapan seminar hingga samapi kompre.
8. Semua teman-teman di FSI Ekonomi (LKEI Ekonomi Unand) ikhwan dan akhwat, special kepada ukhti Mora, Eni, dan Wen. Terima kasih kepada Uni Moni, Uni Iit, Kak Rila, Kak Lusi. Juga untuk Wewen, Nova, Vivi, Yolit, Nike, Meri, dan adik-adik angkatan 09 yang selalu bersemangat, Ami, Riri, Amel, dan Novi.
9. Ikhwan dan Akhwat di FKI Rabbani, special untuk Rabbani '910: Ulin, Kak Fa, Bevi, Zola dan tim Keputrian yang mantap. Teman-teman di Assalam, LPPM dan FKAPMEPI, khusus untuk Pipi, Deni, Deva, Irma dan ikhwan/akhwat yang lain.
10. Dosen-dosen penulis yang telah memberikan banyak bekal dan ni Eva, Mama Loli dan Da Ari terima kasih banyak. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak tertulis disini. Terima kasih banyak, semoga Allah balas dengan kebaikan pula.

Padang, 8 Juli 2011

Penulis

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

## DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Pembatasan Masalah.....	4
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Audit Operasional	
2.1.1 Pengertian Audit Operasional.....	6
2.1.2 Tujuan Audit Operasional.....	7
2.1.3 Manfaat Audit operasional.....	9
2.1.4 Ruang Lingkup Audit Operasional.....	9
2.1.5 Pelaku Audit Operasional.....	10
2.1.6 Jenis Audit Operasional.....	11
2.1.7 Tahapan Audit Operasional.....	11
2.1.8 Keterbatasan Audit Operasional.....	18
2.1.9 Perbedaan Audit Operasional dengan Audit Keuangan.....	19
2.2 Tinjauan Tanggap Bencana	
2.2.1 Pengertian.....	19
2.2.2 Pola Penyelenggaraan Darurat Bencana oleh BNPB.....	21
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	48
3.2 Jenis Data dan Sumber Data.....	48
3.3 Waktu Penelitian.....	48
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	48
3.4 Analisis Data.....	49

## **BAB IV : PEMBAHASAN**

4.1	Gambaran umum Pos Keadilan Peduli Umat Sumatera Barat	
4.1.1	Sejarah Singkat.....	50
4.1.2	Struktur Organisasi.....	52
4.1.3	Visi, Misi dan Moto.....	53
4.1.4	Program Kerja.....	54
4.2	Deskripsi Kerja.....	58
4.3	Pengelolaan Tanggap Darurat Bencana Pada PKPU cabang Padang.....	61
4.4	Pelaksanaan Audit Operasional Atas Tanggap Bencana Pariaman tahun 2009 oleh PKPU cabang padang.....	62
4.4.1	Tahap Perencanaan Audit.....	63
4.4.2	Tahap Pelaksanaan Audit.....	65
4.4.3	Melaporkan Temuan.....	78
<b>BAB V: PENUTUP</b>		
5.1	Kesimpulan.....	80
5.2	Saran.....	80
5.3	Implikasi.....	81
5.4	Keterbatasan Penelitian.....	82
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>		<b>viii</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>83</b>



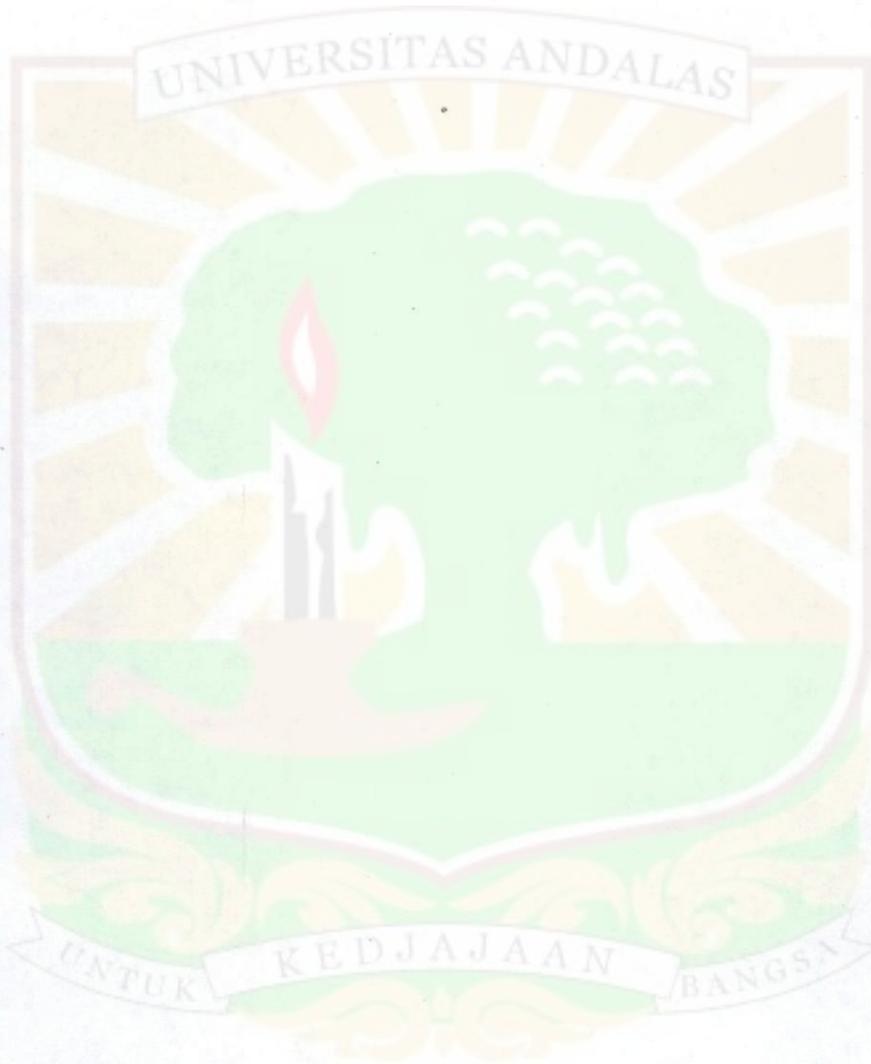
**DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 : Program Kerja Audit ..... 71  
Tabel 4.2 : Kertas Kerja Audit..... 74



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran1: Bukti Audit .....	83
Lampiran2: Laporan Hasil Pemeriksaan.....	90



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Secara geografis Indonesia terletak pada daerah yang rawan bencana alam. Baik itu bencana longsor, gempa, tsunami, angin topan dan bencana alam lainnya. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dalam kurun waktu 1997-2008 telah terjadi 1.994 kejadian banjir, 633 kali tanah longsor, 106 kali gempa bumi, 573 kali angin topan, dan 52 kali letusan gunung berapi. Angka-angka tersebut belum termasuk bencana yang diakibatkan oleh *human error* seperti kebakaran pemukiman, kebakaran hutan, kegagalan teknologi, teror dan sabotase.<sup>1</sup>

Semenjak terjadi bencana gempa dan tsunami di Aceh pada tahun 2004, telah memicu munculnya lembaga-lembaga kemanusiaan yang secara *core competence*-nya bergerak di bidang penggalangan dana sosial. Kepercayaan donatur dan masyarakat dalam menyalurkan bantuannya menjadi hal yang penting bagi lembaga kemanusiaan tersebut, sehingga lembaga ini harus memiliki manajemen yang baik dalam pengelolaan program tanggap bencana.

Banyak lembaga kemanusiaan yang tumbuh di Indonesia, salah satunya adalah PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) yang telah banyak memberikan kontribusi untuk membantu korban bencana dan memulihkan kondisi korban pasca bencana. Kiprah PKPU dalam menanggulangi bencana nasional diantaranya adalah penanggulangan bencana alam gempa dan tsunami di Aceh, gempa di

---

<sup>1</sup> Dikutip dari M. Sabeth Abilawa, Kepala Divisi Advokasi Dompot Dhuafa dalam artikel elektronik dhompot dhuafa.

Yogyakarta, meletusnya gunung Merapi, gempa Padang dan gempa serta tsunami di kepulauan Mentawai. Tidak hanya bencana nasional, PKPU juga turut menyalurkan dana bagi bencana alam di Afghanistan dan di beberapa negara lainnya. PKPU juga sering menjadi lembaga yang mendampingi NGO internasional dalam penanggulangan bencana nasional.

Pos Keadilan Peduli Umat terdaftar di PBB sebagai lembaga dengan status "Special Consultative Status" dari Economic and Social Council (Ecosoc). Kemudian pada tahun 2010, PKPU juga telah resmi terdaftar sebagai Organisasi Sosial Nasional.<sup>2</sup> Pengakuan tersebut tentunya tidak terlepas dari kiprah PKPU dalam membantu penanggulangan bencana dan kepercayaan masyarakat serta donatur.

Tentunya sebagai lembaga yang profesional PKPU mempunyai program penanggulangan bencana tersendiri. Program penanggulangan tersebut dilaksanakan oleh seluruh struktur cabang PKPU yang sudah mencapai hampir diseluruh pelosok Indonesia. Salah satu cabang PKPU yang sering melaksanakan program tanggap bencana ini adalah PKPU cabang Padang yang bekerja sama dengan pusat untuk menaggulangi bencana pada September 2009 di Padang Pariaman Sumatera Barat.

Pada bencana alam tahun 2009 ini PKPU cabang Padang mendapatkan lebih kurang 8 Miliar Rupiah bantuan dana untuk didistribusikan pada korban bencana melalui berbagai program. Telah banyak program yang direncanakan dan telah direalisasikan, PKPU tidak hanya membantu korban bencana selama masa emergency saja atau dalam waktu dua minggu. Namun, hal inilah yang menjadi

---

<sup>2</sup> berdasarkan keputusan Menteri Sosial RI No 08/Huk/2010.

program unggulan PKPU dengan tetap mendampingi masyarakat selama 2 tahun setelah bencana.

Manajemen PKPU mempunyai tujuan agar pelaksanaan program tanggap bencana sesuai dengan ketentuan dan target yang telah ditetapkan PKPU. PKPU juga mempunyai prosedur tersendiri dalam pelaksanaan program tanggap bencana ini, agar pelaksanaan operasional berjalan dengan semestinya. Maka perlu adanya penilaian terhadap pelaksanaan program tersebut. Salah satu dari jasa audit yang ada adalah audit operasional. Audit operasional ini membantu manajemen untuk menemukan berbagai kegiatan operasi perusahaan seperti ketidakefisienan, mengawasi ketentuan terhadap prosedur dan peraturan perusahaan sehingga dapat melakukan perbaikan di kemudian hari. Audit operasional berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti dan efektivitas kegiatan operasi entitas dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan tertentu.<sup>3</sup>

Demikian halnya dengan lembaga-lembaga ataupun yayasan kemanusiaan saat ini banyak terlibat dalam penanggulangan bencana yang sering terjadi di Indonesia dan pada tanggal 30 September 2009 terjadi di Sumatera Barat. Badan kelembagaan kemanusiaan seperti PKPU ( Pos Keadilan Peduli Umat ) sendiri mempunyai program penanggulangan bencana. PKPU adalah salah satu lembaga kemanusiaan yang memiliki jaringan yang luas dan berkembang di Sumatera Barat. Selain itu PKPU juga banyak memberikan kontribusi dalam penanggulangan bencana gempa Sumbar 30 September 2009 terutama di daerah Padang Pariaman. Sehingga tepat untuk melakukan penelitian untuk mengamati, mempelajari dan mengetahui keefektifan dan keefisienan lembaga tersebut dalam

---

<sup>3</sup> Menurut Boy Anton, Johson dan Kell tahun 2003 hal 6

menyalurkan dana bantuan bencana yang diamanahkan masyarakat kepadanya, maka penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan atau peranan audit operasional pada PKPU dengan penelitian ” Audit Operasional atas Pengelolaan Program Tanggap Bencana Gempa tahun 2009 di Padang Pariaman pada PKPU Cabang Padang ”.

## **1.2 PERUMUSAN MASALAH**

Dari uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan audit operasional atas pengelolaan program tanggap bencana pada PKPU cabang Padang di Padang Pariaman saat bencana gempa yang melanda Sumbar 30 September 2009.

## **1.3 PEMBATAAN MASALAH**

Pembahasan masalah akan difokuskan pada pelaksanaan audit operasional pengelolaan program tanggap bencana pada Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Cabang Padang pada bencana gempa 30 September 2009 di Padang Pariaman Sumatera Barat.

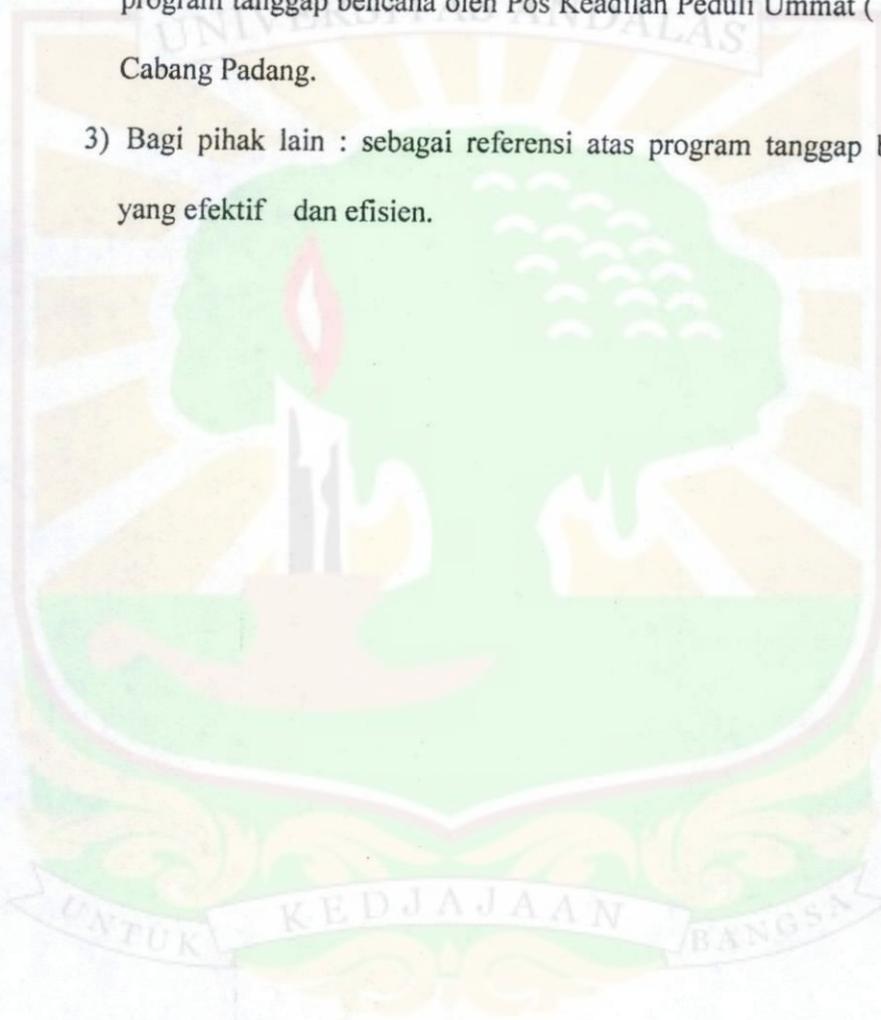
## **1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui dan memahami secara lebih mendalam teoritis audit operasional
- 2) Untuk menilai apakah sistem dan prosedur yang digunakan dalam implementasi program tanggap bencana telah dilakukan dengan semestinya dan memberikan saran demi perbaikan di masa yang akan datang.

Manfaat yang akan didapatkan dalam penelitian ini diantaranya :

- 1) Bagi Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Cabang Padang :  
penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam usaha perbaikan dan penyempurnaan atas kekurangan yang ada berkaitan dengan program tanggap bencana.
- 2) Bagi penulis : mengetahui bagaimana prosedur audit operasional atas program tanggap bencana oleh Pos Keadilan Peduli Ummat ( PKPU ) Cabang Padang.
- 3) Bagi pihak lain : sebagai referensi atas program tanggap bencana yang efektif dan efisien.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 AUDIT OPERASIONAL

##### 2.1.1 PENGERTIAN AUDIT OPERASIONAL

Audit operasional dilakukan oleh internal auditor yang tujuannya adalah untuk mengukur efektivitas dan efisiensi kegiatan sebuah organisasi yang dihubungkan dengan tujuan organisasi atau perusahaan tersebut. Butuh sebuah alat kontrol untuk mengukur efektivitas dan efisiensi perusahaan atau organisasi, maka bisa dikatakan bahwa audit operasional merupakan alat kontrol untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Audit operasional merupakan review secara sistematis kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Tujuan audit operasional adalah untuk mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan dan membuat rekomendasi perbaikan atau tindakan lebih lanjut.<sup>4</sup>

Dalam referensi lain, audit atas operasi yang dilakukan dari sudut pandang manajemen untuk menilai efektivitas, efisiensi dan ekonomis dari setiap dan seluruh operasi, terbatas hanya pada keinginan manajemen<sup>5</sup>.

Audit operasional adalah audit yang sistematis terhadap program, kegiatan/aktivitas organisasi dan seluruh atau sebagian dari aktivitas dengan tujuan menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana telah digunakan secara ekonomis dan efisien, serta apakah tujuan program, dan kegiatan/aktivitas

---

<sup>4</sup> Mulyadi tahun 2008 dalam bukunya "auditing" edisi ke 6

<sup>5</sup> Tunggal tahun 2004 hal dikutip oleh Mesra Prameswari tahun 2008 hal 6

yang telah direncanakan dapat dicapai dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>6</sup>.

Audit operasional adalah tinjauan atas bagian tertentu dari prosedur serta metodeoperasional organisasi tertentu yang bertujuan mengevaluasi efisiensi serta efektivitas prosedur serta metode tersebut<sup>7</sup>.

Pendapat lain menyatakan bahwa:

*" operational auditing is involves obtaining and evaluting evidence about the efficiency and effectiveness of an entity's opraint activities in relation to specifid objectives "*<sup>8</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa audit operasional :

- 1) menitikberatkan pada penilaian efektivitas operasi perusahaan
- 2) ketepatan cara dan sarana,
- 3) kepatuhan terhadap prosedur yang dibuat untuk mencapai tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan atau organisasi.
- 4) hasil akhir dari audit operasional adalah dengan memberikan rekomendasi kepada perusahaan ataupun organisasi tentang hasil temuan
- 5) sebagai bahan pertimbangan dan perbaikan di kemudian hari.

Audit operasional bisa juga berupa review terhadap struktur organisasi ataupun perusahaan. Audit operasional memberikan rekomendasi-rekomendasi agar operasi perusahaan berjalan efektif dan efisien sehingga tercapai tergetan dan tujuan organisasi atau perusahaan.

### **2.1.2 TUJUAN AUDIT OPERASIONAL**

Seperti audit atas laporan keuangan, audit operasional juga memiliki tujuan-tujuan tertentu. Jika audit keuangan bertujuan untuk memastikan dan mereview

---

<sup>6</sup> Pedoman Audit Operasional oleh BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah )

<sup>7</sup> Menurut Alvin A. Arens, Randal J Elder dan Mark S.Beasley tahun 2004 hal 19

<sup>8</sup> Menurut Boyton, Johson dan Kell tahun 2003 hal 6

bahwa informasi keuangan masa lalu sudah tercatat dengan benar dan sesuai dengan standar. Sedangkan tujuan audit operasional adalah untuk mengukur dan menilai efektivitas dan efisiensi jalannya perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Tujuan audit operasional adalah sebagai berikut <sup>9</sup>:

” Objek dari audit operasional adalah mengungkapkan ketidakberesan dalam setiap unsur yang diuji oleh auditor operasional dan menunjukkan perbaikan apa yang mungkin dilakukan untuk memperoleh hasil yang terbaik dari operasi yang bersangkutan”.

- 1) Untuk membantu manajemen mencapai administrasi operasi yang paling efisien
- 2) Untuk mengusulkan kepada manajemen cara-cara dan alat-alat untuk mencapai tujuan
- 3) Untuk mencapai efisiensi dari pengelolaan
- 4) Untuk membantu manajemen pada setiap tingkat dalam pelaksanaan yang efektif dan efisien.

Tujuan audit operasional adalah untuk menilai kinerja, penilaian kinerja ini dengan membandingkan kegiatan organisasi dengan <sup>10</sup>:

- 1) Tujuan organisasi seperti kebijakan, standar, dan sasaran organisasi yang ditetapkan manajemen atau pihak yang menugaskan.
- 2) Kriteria penilaian yang sesuai.

Audit operasional lebih kepada identifikasi peluang perbaikan, peningkatan efektivitas, efisiensi dan ekonomi merupakan kategori yang luas dari pengklasifikasian sebagian besar perbaikan. Mengembangkan perbaikan atau

---

<sup>9</sup> Whittington Oray dan Peny tahun 2000 dalam buku principle of Auditing

<sup>10</sup> Dan M.Guy, Wayne Alferman dan Alan J.winters tahun 2005

tindakan lebih lanjut. Sifat dan luas rekomendasi akan berkembang luas secara beragam selama pelaksanaan audit operasional.<sup>11</sup>

### 2.1.3 MANFAAT AUDIT OPERSIONAL

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil audit operasional adalah agar diperoleh kesimpulan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penilaian yang objektif sejauh mana Unit Kerja melaksanakan program/kegiatannya secara ekonomis, efisien, dan efektif serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Penyimpangan yang material didalam praktik-praktik manajemen dan pengendalian telah diidentifikasi secara memuaskan.
- 3) Rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan atau penyempurnaan program/kegiatan organisasi di masa mendatang.
- 4) Informasi dan rekomendasi yang dapat mengarah kepada perbaikan pertanggungjawaban.

### 2.1.4 RUANG LINGKUP AUDIT OPERASIONAL

Ruang lingkup audit operasional sama halnya dengan aspek manajemen. Adapun ruang lingkup audit operasional adalah :

1. Tujuan Perusahaan
2. Kebijakan dalam operasi
3. Personalia dan fasilitas fisik
4. Fungsi-fungsi yang ada dalam organisasi

Audit operasional mengarahkan pada penilaian mengenai perbandingan antara standar dan kebijakan dengan operasi perusahaan.

---

<sup>11</sup> Ibid

## 2.1.5 PELAKU AUDIT OPERASIONAL

Pelaku audit operasional meliputi :

### 1. Internal auditor

Internal auditor lebih mudah berkomunikasi dengan pihak manajemen perusahaan karena ia terlibat langsung dalam perusahaan tersebut. Selain itu akses informasi pun mudah dilakukan. Namun ada kelemahan dari internal auditor dalam kualitas dan pelaporannya, karena dianggap kurang independen.

### 2. Government auditor

Tujuan dari pelaksanaan audit operasional adalah sebagai berikut :

- 1) mengetahui mengenai penggunaan, perlindungan sumber daya, apakah sudah ekonomis atau efisien.
- 2) penyebab ketidakefisienan dan ketidakekonomisan pelaksanaan.
- 3) kepatuhan entitas terhadap hukum peraturan yang menyangkut tentang ekonomi dan efisien.

Program audit dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui :

- 1) hasil atau keuntungan pada badan legislatif dan pihak yang berwenang, apakah hasil tersebut diterima oleh pihak yang berwenang atau tidak.
- 2) efektivitas organisasi, program., aktivitas atau fungsi
- 3) kepatuhan entity terhadap hukum atau aturan yang berhubungan dengan program.

### 3. Kantor Akuntan Publik

Auditor independen dianggap lebih *competence* dalam melakukan audit karena tidak berasal dari dalam perusahaan sehingga sedikit dapat mengurangi subjektifitasnya.

### **2.1.6 JENIS-JENIS AUDIT OPERASIONAL**

Ada tiga kategori audit operasional yaitu :

1) **Fungsional**

Fungsi adalah sarana untuk mengategorikan aktivitas suatu perusahaan, seperti fungsi penagihan. Ada manfaat yang akan didapat auditor dengan adanya audit fungsional ini diantaranya spesialisasi audit oleh auditor.

2) **Organisasional**

Menyangkut keseluruhan unit organisasional seperti departemen, cabang, dan anak perusahaan. Penekanan dalam suatu audit organisasi adalah seberapa efektif dan efisien fungsi-fungsi saling terkait.

3) **Penugasan Khusus**

Timbul atas permintaan manajemen perusahaan. Ada banyak variasi dalam audit ini misalnya penyelidikan kemungkinan kecurangan dalam suatu divisi.

### **2.1.7 TAHAP-TAHAP AUDIT OPERASIONAL**

Adapun tahapan dalam audit operasional adalah sebagai berikut :

1. **Planning ( Perencanaan )**

Sama halnya dengan audit keuangan, audit operasional juga membutuhkan komunikasi pada entitas yang sedang diaudit. Penting untuk auditor mengetahui organisasi secara tepat, meliputi informasi tentang latar belakang perusahaan, memahami internal kontrol dan memutuskan bukti-bukti yang tepat untuk dikumpulkan.

2. **Mengumpulkan bahan bukti proses audit.**

Ekstensivitas penggunaan dokumentasi, tanya jawab pada klien dan observasi. Konfirmasi dan ketepatan penghitungan kurang ekstensif pada audit

operasional dibandingkan dengan audit keuangan karena keakuratan tidaklah menjadi tujuan utama dari audit operasional.

### 3. Pelaporan dan follow up

Dua perbedaan utama dalam laporan audit operasional dan laporan audit keuangan adalah sebagai berikut :

- 1) Audit operasional, laporan biasanya dikirim hanya pada manajemen dengan salinan unit yang sedang diaudit
- 2) Keragaman audit operasional memerlukan penyusunan laporan secara khusus untuk mengkomunikasikan ruang lingkup, temuan-temuan dan rekomendasi.

Gabungan kedua faktor ini mengakibatkan banyak perbedaan, dalam laporan audit operasional membutuhkan waktu agar temuan dan rekomendasi dapat dikomunikasikan dengan jelas. Follow up merupakan hal biasa dalam audit operasional ketika rekomendasi dibuat untuk manajemen. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah rekomendasi dilakukan atau tidak, dan jika tidak dilakukan dengan alasan apa.

Dalam referensi lain tahap audit operasional adalah sebagai berikut <sup>12</sup>:

#### 1. Memilih auditee

Dimulai dengan studi (atau survey) pendahuluan terhadap calon-calon auditee dalam entitas untuk mengidentifikasi aktivitas yang mempunyai potensi audit tertinggi dilihat dari segi perbaikan efektivitas, efisiensi dan kehematan operasi. Tujuannya adalah penyaringan yang akan menghasilkan peringkat dari calon auditee. Studi pendahuluan ini adalah untuk memperoleh penilaian yang

---

<sup>12</sup> Boyton, Johson dan Kell tahun 2000 dalam Modern Auditing

komprehensif tentang organisasi dan industri atau aturan pemerintah yang meliputi bisnis tersebut.

Pemahaman tentang calon auditee dilakukan dengan :

- 1) mereview data arsip latar belakang setiap auditee
- 2) meninjau fasilitas auditee untuk memastikan bagaimana auditee mencapai tujuannya.
- 3) Mempelajari dokumentasi yang relevan tentang operasi auditee seperti buku petunjuk kebijakan dan prosedur, bagan arus, standar kinerja dan pengendalian mutu serta deskripsi tugas
- 4) Mewawancarai manajer aktivitas tersebut mengenai bidang-bidang permasalahan tertentu
- 5) Menerapkan prosedur analitis untuk mengidentifikasi tren atau hubungan yang tidak biasa
- 6) Melakukan pemeriksaan (pengujian) audit untuk menegaskan atau menjernihkan pemahaman auditor tentang masalah yang potensial.

Semuanya didokumentasikan, menyiapkan laporan atau memorandum studi pendahuluan, yang mengikhtisarkan semua temuan dan mencatatkan rekomendasi mengenai auditee yang harus diaudit.

Pemahaman auditor mengenai setiap auditee harus didokumentasikan melalui kuisioner yang sudah diisi dengan lengkap, bagan arus, dan catatan naratif. Berdasarkan pemahaman ini, auditor menyiapkan suatu laporan atau memorandum audit studi pendahuluan yang mengikhtisarkan semua temuan dan mencantumkan rekomendasi mengenai auditee yang harus diaudit. Laporan ini

hanya digunakan oleh departemen audit internal dan ditujukan hanya untuk manajemen.

## 2. Merencanakan audit

Landasan utama dari perencanaan audit adalah pengembangan program audit yang harus dibuat sesuai keadaan yang ditemui pada tahap studi pendahuluan audit. Program audit berisi seperangkat prosedur yang dirancang untuk memperoleh bukti yang berkaitan dengan satu atau lebih tujuan. Bukti yang diperiksa didasarkan pada sampel data. Disamping itu perlu diperhatikan penggunaan teknik sampling statistik.

Perencanaan audit mencakup pemilihan tim audit dan penjadwalan. Tim audit terdiri dari auditor yang memiliki keahlian teknis yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit. Pekerjaan harus dijadwalkan melalui konsultasi dengan auditee agar ada kerjasama maksimum dari personel auditee selama audit.

## 3. Melaksanakan audit

Selama melaksanakan audit, auditor secara ekstensif harus mencari fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah yang teridentifikasi dalam auditee selama studi pendahuluan. Pelaksanaan audit ini merupakan tahapan yang paling memakan waktu lama.

Disebut juga dengan *depth audit*, adapun pelaksanaannya meliputi :

- a) Wawancara
- b) Kuisisioner
- c) Analisis terhadap standar industri atau dari auditor lain yang serupa.

Dalam pelaksanaannya, auditor sangat mengandalkan pada pengajuan pertanyaan dan pengamatan. Pendekatan yang dilakukan adalah mengembangkan

kuisisioner untuk auditee dan menggunakannya sebagai dasar untuk mewawancarai personil auditee. Dari pengajuan pertanyaan, auditor berharap akan memperoleh pendapat, komentar dan usulan tentang pemecahan masalah. Melalui pengamatan terhadap personil auditee, auditor akan dapat mendeteksi inefisiensi dan kondisi-kondisi lainnya yang ikut menyebabkan masalah ini.

Auditor harus menggunakan analisis dalam audit operasional yang melibatkan studi dan pengukuran kinerja aktual dalam hubungan dengan kriteria tertentu. Kriteria ini dapat dikembangkan secara internal oleh entitas seperti sasaran produktivitas dana anggaran yang ditetapkan atau berasal dari luar entitas berupa standar industri atau diturunkan oleh auditor dari audit-audit sebelumnya atas aktivitas yang serupa. Analisis ini dapat memberikan dasar untuk menetapkan sejauh mana auditee memenuhi tujuan yang ditetapkan.

Pekerjaan yang dilakukan, temuan dan rekomendasi harus didokumentasikan dalam kertas kerja yang merupakan pendukung utama laporan auditor. Auditor penanggung jawab (*in charge*) biasanya bertanggung jawab untuk mereview kertas kerja selama maupun pada saat selesainya pemeriksaan. Review selama audit berguna dalam memantau kemajuan sedangkan review pada akhir audit memastikan kualitas pekerjaan secara keseluruhan.

#### 4. Melaporkan temuan

Laporan audit operasional harus memuat :

- a) Suatu pernyataan tentang tujuan dan ruang lingkup audit
- b) Uraian umum mengenai pekerjaan yang dilakukan dalam audit
- c) Ikhtisar temuan-temuan
- d) Rekomendasi perbaikan

e) Komentar auditee

Konsep laporan ini biasanya oleh auditor penanggung jawab yang dibahas dengan manajer unit yang diaudit. Pembahasan ini mempunyai tujuan yang penting antara lain:

1. Memberi auditor peluang untuk menguji akurasi temuan serta ketepatan rekomendasi
2. Memungkinkan auditor mendapatkan komentar auditee untuk dimasukkan dalam laporan

Konsep awal ini selanjutnya direvisi sesuai keperluan sehingga konsep final dapat disiapkan. Dalam beberapa kasus, rekomendasi yang diberikan mungkin hanya menyarankan perlunya studi lanjut atas masalah yang dihadapi, pencantuman komentar auditee adalah bersifat operasional. Biasanya komentar ini hanya disertakan apabila auditee tidak menyetujui temuan atau rekomendasi.

Semua auditor pada dasarnya menghasilkan kritik yang konstruktif. Pada saat menulis laporan auditor harus sensitif terhadap reaksi penerima. Jika bahasanya tidak terlalu menyerang maka tanggapan penerima laporan kemungkinan besar akan bersifat positif. Salinan laporan dikirimkan ke manajemen senior dan kepada komite audit.

5. Melakukan tindak lanjut

Tahap bagi auditor untuk menindaklanjuti tanggapan auditee terhadap laporan audit. Tindakan lanjut harus mencakup penentuan kelayakan tindakan yang diambil oleh auditee dalam mengimplementasikan rekomendasi. Sedangkan dalam referensi lain struktur atau tahapan audit operasional itu terdiri dari

pengenalan, survei, pengembangan program, pelaksanaan audit dan pelaporan audit<sup>13</sup>.

1) Tahap pengenalan

Pada tahapan ini auditor mengenali kegiatan atau fungsi dari organisasi yang akan diaudit, menelaah mengenai latar belakang informasi, tujuan, struktur organisasi dan pengendalian kegiatan atau fungsi yang diaudit serta hubungan dengan entitas secara keseluruhan.

2) Survei

Tahapan survei ini dikenal juga dengan *preliminary survey*, mengidentifikasi bidang masalah dan bidang penting lainnya yang menjadi kunci keberhasilan kegiatan atau fungsi yang diaudit.

3) Pengembangan program

Auditor menyusun program kerja berdasarkan tujuan audit, yang merinci pengujian dan analisis yang harus dilaksanakan atas bidang-bidang yang dianggap dari hasil survei pendahuluan.

4) Pelaksanaan audit

Auditor melakukan prosedur yang telah ditentukan dalam program audit untuk mengumpulkan bukti-bukti, melakukan analisis, mengambil kesimpulan dan rekomendasi.

5) Pelaporan

Dalam laporan audit operasional seharusnya ada 2 hal yang harus tercantum yaitu tujuan penugasan dan ruang lingkup, pendekatan yang digunakan dan temuan-temuan khusus serta rekomendasi.

---

<sup>13</sup> Dan M. Guy, Wayne Alderman dan Alan J. Winters tahun 2003 dalam buku Auditing

### 2.1.8 KETERBATASAN AUDIT OPERASIONAL

Audit operasional memiliki ruang lingkup yang cukup luas, sehingga tidak mungkin untuk menentukan ciri-ciri pelaksanaan audit operasional secara pasti.<sup>14</sup> Beda halnya dengan audit keuangan yang jelas dalam pengukurannya, audit operasional tidak hanya terbatas pada masalah-masalah akuntansi, melainkan juga dapat meliputi review terhadap struktur organisasi misalnya.

Pelaksanaan dan pelaporan hasil audit operasional lebih sulit untuk didefinisikan dibandingkan dengan audit lainnya. Penilaian operasi perusahaan cukup sulit untuk dibandingkan dengan suatu standar yang ada pada audit keuangan. Sehingga tak lepas dari penilaian-penilaian yang subjektif yang terkadang tak bisa dihindari.

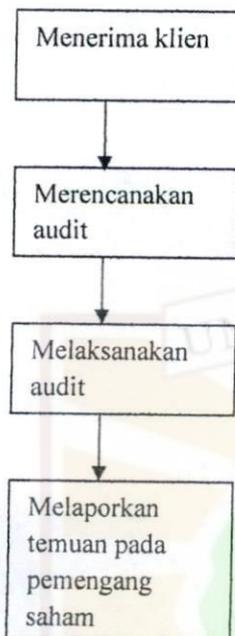
Dalam prakteknya, auditor yang melakukan audit operasional lebih kepada memberikan saran dan rekomendasi dibandingkan dengan memberikan laporan atas kewajaran penyajian dan pelaporan layaknya audit keuangan dan audit ketaatan. Sehingga audit operasional lebih cenderung mengarah pada konsultasi manajemen.

---

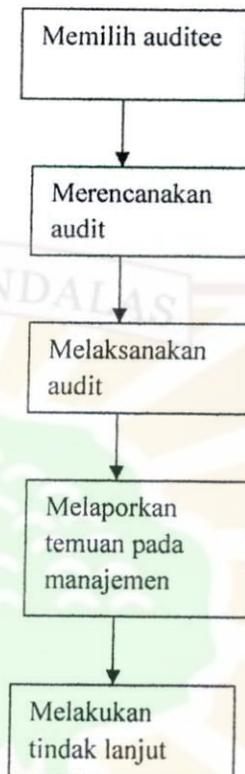
<sup>14</sup> Arens dan Loebbacke dalam bukunya Auditing Pendekatan Terpadu tahun 2000 hal 4

## 2.1.9 PERBEDAAN AUDIT OPERASIONAL DAN AUDIT KEUANGAN

Tahap audit keuangan



Tahap audit operasional



## 2.2 TINJAUAN TANGGAP BENCANA<sup>15</sup>

### 2.2.1 PENGERTIAN

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam ada/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan dan kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Sedangkan mengenai pengertian Bencana Alam menurut Perda yang sama menyatakan bahwa bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa

<sup>15</sup> Menurut peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 5 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 Ketentuan Umum

atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam diantaranya gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya

peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

## 2.2.2 POLA PENYELENGGARAAN TANGGAP DARURAT BENCANA OLEH BNPB (BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA)

### A. Tahapan Pembentukan Komando Tanggap Bencana<sup>16</sup>

4 tahapan dalam pembentukan komando tanggap darurat:

#### 1. Informasi Kejadian Awal

Informasi kejadian awal didapatkan dari berbagai sumber, diantaranya dari media masa, masyarakat dan sebagainya. Dalam penentuan dan ketersediaan informasi yang pasti maka ada beberapa kriteria yang dijadikan dalam pengumpulan informasi tersebut :

- a) What/ apa : jenis bencana
- b) Bilamana : hari, tanggal, bulan, tahun, waktu, jam waktu setempat
- c) Dimana : tempat, lokasi, daerah bencana
- d) Berapa : jumlah korban, sarana dan prasana yang mengalami kerusakan
- e) Penyebab : penyebab terjadinya bencana
- f) Bagaimana : bagaimana kejadian bencana tersebut bisa terjadi

#### 2. Penugasan Tim Reaksi Cepat

Dari informasi awal yang dilakukan pada awal tadi, BNPB atau BPBD menugaskan Tim Reaksi Cepat untuk mengkaji secara cepat, tepat dan dampak

---

<sup>16</sup> Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No.10 tahun 2008 tentang Pedoman Tanggap Bencana

bencana serta memberikan dukungan pendampingan dalam penanganan darurat bencana.

Hasil dari Tim Reaksi Cepat ini akan dijadikan pertimbangan dalam membuat keputusan bagi :

- 1) Kepala BPBD kota/kabupaten untuk di usulkan pada walikota/bupati untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan skala dan status bencana tingkat kota/kabupaten
  - 2) Kepala BPBD provinsi untuk diusulkan kepada gubernur dalam rangka menentukan status /tingkat bencana skala provinsi
  - 3) Kepala BNPB untuk diusulkan kepada Presiden dalam rangka menentukan status bencana nasional
3. Penetapan status/ skala bencana

Berdasarkan usul diatas dan berbagai masukan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam forum rapat dengan instansi/lembaga terkait, maka:

- a) Bupati/walikota menetapkan status/skala bencana tingkat kabupaten/kota
- b) Gubernur menetapkan status/skala bencana tingkat provinsi
- c) Presiden RI menetapkan status/skala bencana tingkat nasional

Tindak lanjut dari penetapan status/ skala bencana tersebut, maka kepala BNPB/BPBD Provinsi /BPBD Kabupaten/BPBD kota sesuai dengan kewenangannya menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan tanggap darurat bencana sesuai status/tingkat bencana skala nasional atau daerah.

#### 4. Pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana

Kepala BNPB/BPBD provinsi/BPBD Kabupaten/BPBD kota sesuai status/tingkat bencana dan sesuai dengan kewenangannya :

- 1) Mengeluarkan surat keputusan pembentukan komando tanggap darurat bencana
- 2) Melaksanakan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan dan logistik serta dana dari instansi/lembaga terkait dan/atau masyarakat
- 3) Meresmikan komando tanggap darurat bencana

#### **B. Pola Penyelenggaraan Sistem Komando Tanggap Bencana<sup>17</sup>**

Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana diselenggarakan dengan pola yang terdiri atas rencana operasi, permintaan, pengerahan/mobilisasi sumberdaya yang didukung dengan fasilitas komando yang diselenggarakan sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkatan bencana. Penyelenggaraan Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana diakhiri oleh pembubaran Komando Tanggap Darurat Bencana.

Penyelenggaraan Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana dilaksanakan sebagai berikut:

##### **1. Rencana Operasi**

1. Rencana Operasi Komando Tanggap Darurat Bencana berikut Rencana Tindakan Operasi penanganan tanggap darurat bencana, merupakan acuan bagi setiap unsur pelaksana dalam komando.

---

<sup>17</sup> ibid

2. Pertolongan pertama, penyelamatan, keselamatan, dan keamanan  
Persiapan Tim penyelamatan yang tergabung dari bidang Medis, SAR dan sumber daya lainnya.
3. Posko Bencana Tersedianya Posko Bencana, Peta Bencana, Daftar Personil Tim dan Alat Komunikasi pendukung serta Daftar Nomor Telepon Penting.
4. Peralatan dan Perlengkapan  
Persiapan dan tersedianya alat-alat pendukung untuk penyelamatan dan penanggulangan bencana.
5. Pemenuhan Kebutuhan Dasar  
Persiapan dan tersedianya bahan-bahan pokok berupa sandang, pangan, air bersih dan sanitasi.

## **2. Permintaan Sumberdaya**

Mekanisme permintaan sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Komandan Tanggap Darurat Bencana tingkat kabupaten/kota, atau tingkat provinsi yang terkena bencana, mengajukan permintaan kebutuhan sumberdaya kepada Kepala BPBD Kabupaten/Kota/Provinsi maupun kepada Kepala BNPB, berdasarkan atas ketersediaan sumberdaya di lokasi dan tingkatan bencana.
- 2) Kepala BPBD Kabupaten/Kota/Provinsi maupun Kepala BNPB, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencana, meminta dukungan sumberdaya manusia, logistik dan peralatan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban, memenuhi kebutuhan dasar hidup dan

memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak kepada pimpinan instansi/lembaga terkait sesuai tingkat kewenangannya.

- 3) Instansi/lembaga terkait dimaksud adalah: Departemen/Dinas Sosial, BULOG/DOLOG, Departemen/Dinas Kesehatan, Departemen/Dinas Pekerjaan Umum, Departemen/Dinas Perhubungan, Basarnas/Basarda Kabupaten/Kota, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Palang Merah Indonesia, Departemen/Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta instansi/lembaga lainnya sesuai tingkat kewenangannya.
- 4) Instansi/lembaga terkait wajib segera mengirimkan serta memobilisasi sumberdaya manusia, logistik dan peralatan ke lokasi bencana.
- 5) Penerimaan serta penggunaan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud dilaksanakan dibawah kendali Kepala BPBD/BNPB dan atau Departemen Keuangan.

### **3. Pengerahan/Mobilisasi Sumberdaya**

Pengerahan/mobilisasi sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Instansi/lembaga/organisasi terkait dalam mengirimkan sumberdaya harus didampingi oleh personil instansi/lembaga asal dan penyerahannya dilengkapi dengan administrasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Apabila instansi/lembaga/organisasi terkait pada tingkat tertentu tidak memiliki kemampuan sumberdaya yang dibutuhkan, maka BPBD

maupun BNPB sesuai dengan tingkat kewenangannya berkewajiban membantu/mendampingi pengiriman/mobilisasi sumber daya sampai ke lokasi bencana.

#### **4. Fasilitas Komando Tanggap Darurat Bencana**

Untuk meningkatkan efektifitas dan mempercepat respons penanganan tanggap darurat bencana, Komando Tanggap Darurat Bencana perlu menyiapkan dan menghimpun dukungan operasi penanganan darurat bencana yang terdiri dari:

- a) Pos Komando, meliputi Posko Tanggap Darurat dan Poskolap.
- b) Personil Komando, adalah semua sumberdaya manusia yang bertugas dalam organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana dengan kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk penugasan penanganan darurat bencana.
- c) Gudang, tempat penyimpanan logistik dan peralatan.
- d) Sarana dan prasarana transportasi, baik yang merupakan fasilitas dasar maupun spesifik sesuai jenis bencana.
- e) Peralatan, baik yang merupakan fasilitas dasar maupun fasilitas yang spesifik sesuai jenis bencana.
- f) Alat komunikasi dan peralatan komputer.
- g) Data serta informasi bencana dan dampak bencana.

#### **5. Pengakhiran**

1. Menjelang berakhirnya waktu pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana, Kepala BPBD Kabupaten/Kota/Provinsi atau Kepala BNPB membuat rencana pengakhiran operasi tanggap darurat bencana

dengan mengeluarkan Surat Perintah Pengakhiran Operasi Tanggap Darurat Bencana kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana sesuai dengan kewenangannya.

2. Pada hari dan tanggal waktu berakhirnya operasi tanggap darurat bencana, Kepala BNPB/BPBD membubarkan Komando Tanggap Darurat Bencana dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembubaran.

#### **6. Pola Pengerahan Sumberdaya di Tingkat Kabupaten/Kota**

Pengerahan sumberdaya di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan dengan pola sebagai berikut:

1. Dalam hal bencana tingkat kabupaten/kota, Kepala BPBD Kabupaten/Kota yang terkena bencana, mengerahkan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik sesuai kebutuhan ke lokasi bencana.
2. Apabila kebutuhan tersebut tidak tersedia/tidak memadai, maka pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan dapat meminta bantuan kepada pemerintah kabupaten/kota terdekat baik dalam satu wilayah provinsi maupun provinsi lain.
3. Apabila pemerintah kabupaten/kota yang dimintai bantuan tidak memiliki ketersediaan sumberdaya/tidak memadai, maka pemerintah kabupaten/kota yang terkena bencana dapat meminta bantuan kepada pemerintah provinsi yang bersangkutan.
4. Biaya yang timbul akibat pengerahan bantuan ini ditanggung oleh pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.

5. Pelaksanaan pengerahan sumber daya dari asal sampai dengan lokasi bencana dilaksanakan dibawah kendali Kepala BPBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
6. Apabila terdapat keterbatasan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik yang dikerahkan oleh Kepala BPBD Kabupaten/Kota, maka BNPB dapat membantu melalui pola pendampingan.
7. Pola pendampingan oleh BNPB dapat berupa dukungan biaya pengepakan, biaya pengiriman, jasa tenaga pengangkutan dan dukungan peralatan tanggap darurat bencana.

#### **7. Pola Pengerahan Sumberdaya di Tingkat Provinsi**

1. Pengerahan sumberdaya di tingkat provinsi dilaksanakan dengan pola sebagai berikut:
2. Dalam hal bencana tingkat provinsi, Kepala BPBD Provinsi yang terkena bencana mengerahkan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik sesuai kebutuhan ke lokasi bencana.
3. Apabila kebutuhan tersebut tidak tersedia/tidak memadai, maka pemerintah provinsi yang bersangkutan dapat meminta bantuan kepada provinsi lain yang terdekat.
4. Apabila provinsi yang dimintai bantuan tidak memiliki ketersediaan sumberdaya/tidak memadai, maka pemerintah provinsi yang terkena bencana dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat.
5. Biaya yang timbul akibat pengerahan bantuan ini ditanggung oleh pemerintah provinsi yang bersangkutan.

6. Pelaksanaan pengerahan sumber daya dari asal sampai dengan lokasi bencana dilaksanakan dibawah kendali Kepala BPBD Provinsi yang bersangkutan.
7. Apabila terdapat keterbatasan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik yang dikerahkan oleh Kepala BPBD Propinsi, maka BNPB dapat membantu melalui pola pendampingan.
8. Pola pendampingan oleh BNPB dapat berupa dukungan biaya pengepakan, biaya pengiriman, jasa tenaga pengangkutan dan dukungan peralatan tanggap darurat bencana.

#### **8. Pola Penyelenggaraan di Tingkat Nasional**

Pendistribusian logistik kepada masyarakat dilaksanakan oleh Komando Tanggap Darurat Bencana sesuai dengan dinamika yang terjadi, terutama untuk pemenuhan kebutuhan dasar hidup meliputi pangan, sandang, air bersih, sanitasi, hunian sementara, pelayanan kesehatan dan lain-lain.

#### **C. Evaluasi dan Pelaporan**

##### **A. Evaluasi**

Komandan Tanggap Darurat Bencana melakukan rapat evaluasi setiap hari dan merencanakan kegiatan hari berikutnya. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan laporan harian kepada Kepala BPBD atau Kepala BNPB dengan tembusan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait.

##### **B Pelaporan**

1. Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam penanganan darurat bencana berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BPBD/BNPB

sesuai tingkat kewenangannya dengan tembusan kepada Komandan Tanggap Darurat bencana sesuai tingkat kewenangannya.

2. Pelaporan meliputi pelaksanaan Komando Tanggap Darurat Bencana, jumlah/kekuatan sumber daya manusia, jumlah peralatan, jumlah setiap jenis/macam logistik dan sumber daya lainnya serta dilengkapi dengan sistem distribusinya secara tertib dan akuntabel.
3. Komandan Tanggap Darurat Bencana sesuai tingkat kewenangannya mengirimkan laporan harian, laporan khusus dan laporan insidentil tentang pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana kepada Kepala BNPB/BPBD dengan tembusan kepada instansi/lembaga/ organisasi yang terkait.
4. Kepala BPBD melaporkan kepada Walikota/Bupati/Gubernur dan Kepala BNPB.
5. Kepala BNPB melaporkan penanganan tanggap darurat bencana kepada Presiden.

#### **D. Tata Cara Pemberian Pemenuhan Kebutuhan Dasar<sup>18</sup>**

##### **Jenis Bantuan**

##### **A. Bantuan Tempat Penampungan/Hunian Sementara**

Bantuan penampungan/hunian sementara diberikan dalam bentuk tenda-tenda, barak, atau gedung fasilitas umum/sosial, seperti tempat ibadah, gedung olah raga, balai desa, dan sebagainya, yang memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat tinggal sementara.

Standar Minimal Bantuan :

- a. Berukuran 3 (tiga) meter persegi per orang.

---

<sup>18</sup> Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana no.7 tahun 2008 mengenai Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Dasar

- b. Memiliki persyaratan keamanan dan kesehatan.
- c. Memiliki aksesibilitas terhadap fasilitas umum.
- d. Menjamin privasi antar jenis kelamin dan berbagai kelompok usia.

## B. Bantuan Pangan

Bantuan pangan diberikan dalam bentuk bahan makanan, atau masakan yang disediakan oleh dapur umum. Bantuan pangan bagi kelompok rentan diberikan dalam bentuk khusus.

Standar Minimal Bantuan :

- a. Bahan makanan berupa beras 400 gram per orang per hari atau bahan makanan pokok lainnya dan bahan lauk pauk.
- b. Makanan yang disediakan dapur umum berupa makanan siap saji sebanyak 2 kali makan dalam sehari.
- c. Besarnya bantuan makanan (poin a dan b) setara dengan 2.100 kilo kalori (kcal).

## C. Bantuan Non Pangan

Bantuan non pangan diberikan kepada korban bencana dalam status pengungsi di tempat hunian sementara pada pasca tanggap darurat, dalam bentuk :

### 1. Peralatan Memasak dan Makan

Masing-masing rumah tangga korban bencana dapat memperoleh bantuan peralatan memasak dan perlengkapan untuk makan.

Standar Minimal Bantuan :

- a. Tiap rumah tangga memiliki :
  - 1) Peralatan pokok berupa 1 panci besar dengan pegangan dan penutup, 1 panci sedang dengan pegangan dan penutup, 1

baskom untuk penyiapan dan penyajian, 1 pisau dapur, dan 2 centong kayu.

2) Sebuah ember tertutup dengan kapasitas 40 liter dan sebuah ember terbuka dengan kapasitas 20 liter.

3) Sebuah jerigen dengan kapasitas 20 liter.

b. Tiap orang memiliki : 1 piring makan, 1 sendok makan, 1 cangkir atau gelas.

c. Pemberian bantuan botol susu bayi hanya untuk kasus-kasus tertentu.

## 2. Kompor, Bahan Bakar, dan Penerangan

Masing-masing rumah tangga korban bencana dapat memperoleh sarana memasak, yaitu kompor dan pasokan bahan bakar dan lampu penerangan secara memadai.

Standar Minimal Bantuan :

a. Kompor dan bahan bakar yang tersedia secara rutin.

b. Tersedianya tempat penyimpanan bahan bakar yang aman.

c. Alat penerangan seperti : lampu lentera, lilin, atau penerangan lain yang memadai.

## 3. Alat-alat dan Perkakas

Korban bencana dapat memperoleh bantuan alat-alat dan perkakas untuk memperbaiki hunian sementara.

Standar Minimal Bantuan :

- 1) Memperoleh kemudahan untuk mendapatkan bantuan alat-alat dan perkakas yang dibutuhkan, seperti martil, gergaji, cangkul, sekop, kapak, parang, dan gerobak kayu.
- 2) Memperoleh pelatihan dan pembimbingan dalam penggunaan alat-alat dan perkakas.

D. Bantuan Sandang

Bantuan Sandang terdiri dari :

1. Perlengkapan Pribadi

Perlengkapan pribadi merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting untuk melindungi diri dari iklim, memelihara kesehatan serta mampu menjaga privasi dan martabat.

Standar Minimal Bantuan :

- a. Memiliki satu perangkat lengkap pakaian dengan ukuran yang tepat sesuai jenis kelamin masing-masing, serta peralatan tidur yang memadai sesuai standar kesehatan dan martabat manusia.
- b. Perempuan dan anak-anak setidaknya memiliki dua perangkat lengkap pakaian dengan ukuran yang tepat sesuai budaya, iklim, dan musim.
- c. Perempuan dan anak-anak gadis setidaknya memiliki dua perangkat lengkap pakaian dalam dengan ukuran yang tepat sesuai budaya, iklim, dan musim.

- d. Anak sekolah setidaknya memiliki 2 stel seragam sekolah lengkap dengan ukuran yang tepat sesuai jenis kelamin dan jenjang sekolah yang diikuti.
- e. Anak sekolah memiliki satu pasang sepatu/ alas kaki yang digunakan untuk sekolah
- f. Setiap orang memiliki pakaian khusus untuk beribadah sesuai agama dan keyakinannya.
- g. Setiap orang memiliki satu pasang alas kaki.
- h. Bayi dan anak-anak dibawah usia 2 tahun harus memiliki selimut dengan ukuran 100 X 70 cm.
- i. Setiap orang yang terkena bencana harus memiliki alas tidur yang memadai, dan terjaga kesehatannya.
- j. Setiap kelompok rentan : bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat, orang sakit, dan orang lanjut usia, memiliki pakaian sesuai kebutuhan masing-masing.
- k. Setiap kelompok rentan, memiliki alat bantu sesuai kebutuhan, misalnya : tongkat untuk lansia dan penyandang cacat.

## 2. Kebersihan Pribadi

Tiap rumah tangga memperoleh kemudahan mendapatkan bantuan sabun mandi dan barang-barang lainnya untuk menjaga kebersihan, kesehatan, serta martabat manusia.

Standar Minimal Bantuan :

- a. Setiap orang memiliki 250 gram sabun mandi setiap bulan.
- b. Setiap orang memiliki 200 gram sabun cuci setiap bulan.
- c. Setiap perempuan dan anak gadis yang sudah menstruasi memiliki bahan pembalut.
- d. Setiap bayi dan anak-anak di bawah usia dua tahun memiliki 12 popok cuci sesuai kebiasaan di tempat yang bersangkutan.
- e. Setiap orang memiliki sikat gigi dan pasta gigi sesuai kebutuhan.

E. Bantuan Air Bersih dan Sanitasi

1. Bantuan Air Bersih

Diberikan dalam bentuk air yang kualitasnya memadai untuk kebersihan pribadi maupun rumah tangga tanpa menyebabkan risiko yang berarti terhadap kesehatan. Bantuan air bersih diberikan dalam bentuk sumber air beserta peralatannya.

Standar Minimal Bantuan :

- a. Bantuan air bersih diberikan sejumlah 7 liter pada tiga hari pertama, selanjutnya 15 liter per orang per hari.
- b. Jarak terjauh tempat penampungan sementara dengan jamban keluarga adalah 50 meter.
- c. Jarak terjauh sumber air dari tempat penampungan sementara dengan titik air terdekat adalah 500 meter.

2. Bantuan Air Minum

Diberikan dalam bentuk air yang dapat diminum langsung atau air yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk dapat diminum.

Standar Minimal Bantuan :

- a. Bantuan air minum diberikan sejumlah 2.5 liter per orang per hari.
- b. Rasa air minum dapat diterima dan kualitasnya cukup memadai untuk diminum tanpa menyebabkan resiko kesehatan.

3. Bantuan Sanitasi

Diberikan dalam bentuk pelayanan kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan saluran air (drainase), pengelolaan limbah cair dan limbah padat, pengendalian vektor, serta pembuangan tinja.

Standar Minimal Bantuan :

- a. Sebuah tempat sampah berukuran 100 liter untuk 10 keluarga, atau barang lain dengan jumlah yang setara.
- b. Penyemprotan vektor dilakukan sesuai kebutuhan.
- c. Satu jamban keluarga digunakan maksimal untuk 20 orang.
- d. Jarak jamban keluarga dan penampung kotoran sekurangkurangnya 30 meter dari sumber air bawah tanah.
- e. Dasar penampung kotoran sedekat-dekatnya 1,5 meter di atas air tanah. Pembuangan limbah cair dari jamban keluarga tidak merembes ke sumber air manapun, baik sumur maupun mata air lainnya, sungai, dan sebagainya.
- f. Satu tempat yang dipergunakan untuk mencuci pakaian dan peralatan rumah tangga, paling banyak dipakai untuk 100 orang.

## F. Bantuan Pelayanan Kesehatan

Korban bencana, baik secara individu maupun berkelompok, terutama untuk kelompok rentan, dapat memperoleh bantuan pelayanan kesehatan. Bantuan pelayanan kesehatan diberikan dalam bentuk :

1. Pelayanan kesehatan umum meliputi :

a. Pelayanan kesehatan dasar.

b. Pelayanan kesehatan klinis.

Standar Minimal Bantuan :

1. Pelayanan kesehatan didasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan kesehatan primer yang relevan.
2. Semua korban bencana memperoleh informasi tentang pelayanan kesehatan.
3. Pelayanan kesehatan diberikan dalam sistem kesehatan pada tingkat yang tepat : tingkat keluarga, tingkat puskesmas, Rumah Sakit, dan Rumah Sakit rujukan.
4. Pelayanan dan intervensi kesehatan menggunakan teknologi yang tepat dan diterima secara sosial budaya.
5. Jumlah, tingkat, dan lokasi pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan korban bencana.
6. Tiap klinik kesehatan memiliki staf dengan jumlah dan keahlian yang memadai untuk melayani kebutuhan korban bencana. Staf klinik maksimal melayani 50 pasien per hari.
7. Korban bencana memperoleh pelayanan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan.

8. Korban bencana yang meninggal diperlakukan dan dikuburkan dengan cara yang bermartabat sesuai dengan keyakinan, budaya, dan praktek kesehatan.

2. Pengendalian penyakit menular meliputi :

- a. Pencegahan Umum
- b. Pencegahan Campak
- c. Diagnosis dan Pengelolaan Kasus
- d. Kesiapsiagaan Kejadian Luar Biasa
- e. Deteksi KLB, Penyelidikan & Tanggap. HIV/AIDS

Standar Minimal Bantuan :

- a. Pemberian vitamin A bagi bayi berusia 6 bulan sampai balita usia 59 bulan.
- b. Semua bayi yang divaksinasi campak ketika berumur 6 sampai 9 bulan menerima dosis vaksinasi ulang 9 bulan kemudian.
- c. Anak berusia 6 bulan sampai 15 tahun dapat diberikan imunisasi campak.
- d. Korban bencana memperoleh diagnosis dan perawatan yang efektif untuk penyakit menular yang berpotensi menimbulkan kematian dan rasa sakit yang berlebihan.
- e. Diambil tindakan-tindakan untuk mempersiapkan dan merespon berjangkitnya penyakit menular.
- f. Berjangkitnya penyakit menular dideteksi, diinvestigasi, dan dikontrol dengan cara yang tepat waktu dan efektif.

g. Korban bencana memperoleh paket pelayanan minimal untuk mencegah penularan HIV/AIDS.

3. Pengendalian penyakit tidak menular, meliputi :

- a. Cedera
- b. Kesehatan Reproduksi
- c. Aspek Kejiwaan dan Sosial Kesehatan
- d. Penyakit Kronis

Standar Minimal Bantuan :

- a. Korban bencana memperoleh pelayanan tepat untuk mengatasi cedera.
- b. Korban bencana memperoleh pelayanan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan reproduksi.
- c. Korban bencana memperoleh pelayanan kesehatan sosial dan mental sesuai kebutuhan.

### **Penyelenggaraan Pemberian Bantuan**

#### **A. Pengorganisasian**

Pengorganisasian atau tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai dengan tingkatan bencana, melalui Sistem Komando Tanggap Darurat bencana. Negara donor atau NGO yang akan memberikan bantuan kepada Indonesia harus menghubungi kantor kedutaan atau kantor perwakilan. Selanjutnya, kedutaan atau kantor perwakilan akan berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri perihal jenis bantuan.

Informasi tentang bantuan tersebut akan diteruskan kepada BNPB. Selanjutnya berdasarkan hasil penilaian cepat atau rapid assessment, BNPB menentukan jenis dan jumlah kebutuhan dasar yang diperlukan, untuk disampaikan kepada pihak yang akan memberikan bantuan. Pihak imigrasi, bea cukai, Mabes POLRI dan TNI, serta Departemen Perhubungan harus mempermudah prosedur tersebut.

1. Pemberi Bantuan dari Luar Negeri

Bantuan dari masyarakat/NGO luar negeri diberikan melalui BNPB atau BPBD kepada korban bencana, atau langsung kepada korban bencana setelah berkoordinasi dengan BNPB atau BPBD.

2. Pemberi dan Penyalur Bantuan

a. Tingkat pusat : BNPB/Departemen terkait.

Tugas : Menerima dan menyalurkan bantuan.

b. Tingkat Provinsi : BPBD Provinsi/Dinas tingkat Provinsi.

Tugas : Menerima dan menyalurkan bantuan.

c. Tingkat Kabupaten/Kota : BPBD Kabupaten/Kota dan Dinas tingkat Kabupaten/Kota.

Tugas : Menerima dan menyalurkan bantuan.

3. Penerima bantuan : Korban bencana.

B. Pelaksana Pemberian Bantuan

1. Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan oleh Tim pelaksana Pemberi Bantuan.

2. Tim Pelaksana Pemberi Bantuan dipimpin oleh seorang Koordinator Lapangan yang dibantu oleh :

- 1) Petugas Administrasi
- 2) Petugas Medis
- 3) Petugas Keamanan
- 4) Petugas Dapur Umum Lapangan
- 5) Pekerja Sosial
- 6) Psikolog
- 7) Petugas teknis sesuai kebutuhan, seperti teknisi pendirian tenda, teknisi air bersih, teknisi sanitasi, teknisi penerangan, teknisi komunikasi.
- 8) Partisipan lain yang memiliki kepedulian dalam penanggulangan bencana.

3. Tim pelaksana pemberi bantuan dapat berasal dari :

- 1) Pemerintah daerah, desa/kelurahan
- 2) Instansi pemerintah
- 3) TNI / POLRI
- 4) LSM
- 5) PMI
- 6) Perguruan Tinggi
- 7) Anggota masyarakat lainnya
- 8) Tim Pelaksana Pemberi Bantuan adalah instansi, organisasi, kelompok, atau perorangan yang telah dilatih dalam penanggulangan bencana atau memiliki ketrampilan sesuai kebutuhan.

## C. Pelaksanaan Pemberian Bantuan

### 1. Penyusunan Daftar Penerima Bantuan

Agar bantuan yang diberikan tepat sasaran, maka perlu dilakukan identifikasi penerima bantuan secara rinci sehingga tidak satu orangpun korban bencana yang tertinggal dan tidak menerima bantuan.

Mekanisme yang dilakukan pada kegiatan pendaftaran penerima bantuan adalah sebagai berikut :

#### a. Langkah-langkah

- 1) Mengidentifikasi jumlah keluarga di setiap titik penampungan
- 2) Berdasarkan identifikasi jumlah keluarga, disusun daftar penerima bantuan secara keseluruhan sesuai dengan kelompok umur.

#### b. Teknik yang digunakan

Penyusunan daftar penerima bantuan dilakukan dengan menggunakan survey di seluruh tempat penampungan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi (jika ada). Keragaman penggunaan teknik dimaksudkan agar data benar-benar valid.

#### c. Waktu pelaksanaan

Penyusunan daftar penerima bantuan dilakukan sesegera mungkin, agar pengadaan bantuan dapat diupayakan dengan cepat dan pendistribusian bantuan dapat segera dilakukan.

#### d. Pelaksana

Yang bertugas melakukan penyusunan daftar penerima bantuan adalah petugas/tim pengumpul data yang telah terlatih atau memiliki pengalaman dalam

melakukan pengumpulan data. Pelaksana dapat ditetapkan oleh petugas yang berwenang (koordinator lapangan).

## 2. Penilaian Kebutuhan (need assessment)

Agar bantuan yang diberikan pada korban sesuai dengan yang dibutuhkan, perlu dilakukan penilaian dengan mempertimbangkan kelompok umur, jenis kelamin, dan kelompok rentan lainnya. Susunan daftar penerima bantuan dapat dijadikan data awal dalam mempertimbangkan kebutuhan penerima bantuan.

Mekanisme yang dilakukan pada kegiatan penilaian kebutuhan adalah sebagai berikut :

### a. Langkah-langkah

#### 1) Mengidentifikasi kebutuhan penerima bantuan (korban bencana).

- 1) Mengidentifikasi kebutuhan penerima bantuan .
- 2) Menentukan prioritas bantuan yang diperlukan.
- 3) Menyusun daftar kebutuhan berdasarkan prioritas yang diperlukan.

#### 2) Mengidentifikasi sumber.

- 1) Mengidentifikasi barang-barang/aset yang masih dimiliki korban/penerima bantuan
- 2) Mengidentifikasi pihak-pihak yang mungkin dilibatkan dalam penyediaan kebutuhan yang diperlukan penerima bantuan.
- 3) Mengidentifikasi sumber-sumber lain di sekitar tempat penampungan.

3) Menentukan jenis bantuan yang diperlukan penerima bantuan (korban bencana).

- 1) Berdasarkan identifikasi kebutuhan dan sumber, selanjutnya dapat ditentukan jenis bantuan apa saja yang diperlukan penerima bantuan
- 2) Selain daftar jenis bantuan dan pihak yang dapat dilibatkan, perlu disusun daftar kebutuhan yang diperlukan setiap hari, seminggu sekali, atau sebulan sekali pada masa tanggap darurat

b. Teknik yang digunakan

Kegiatan identifikasi kebutuhan dapat dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan diskusi dengan calon penerima bantuan. Keterlibatan korban dalam kegiatan ini dimaksudkan agar bantuan yang akan diberikan sesuai dengan prioritas kebutuhan mereka.

c. Waktu pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan identifikasi kebutuhan dapat dilakukan setelah daftar penerima bantuan tersusun. Selanjutnya daftar penerima bantuan akan dijadikan salah satu acuan dalam melakukan identifikasi kebutuhan.

d. Pelaksana

Pelaksanaan kegiatan ini dapat dilakukan oleh petugas/tim pengumpul data/pendamping lapangan yang telah terlatih atau memiliki pengalaman dalam melakukan penilaian kebutuhan.

### 3. Penentuan Jumlah Bantuan

Langkah berikutnya dari mekanisme pemberian bantuan adalah menentukan jumlah bantuan yang harus didistribusikan pada seluruh penerima bantuan (korban bencana).

#### a. Langkah-langkah

1. Menyiapkan daftar penerima bantuan dan daftar kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan prioritas.
2. Menghitung perkiraan jumlah yang harus didistribusikan pada setiap hari/minggu/bulan.
3. Menghitung jumlah bantuan tidak terduga.
4. Menghitung jumlah keseluruhan bantuan yang diperlukan selama masa di penampungan.

#### b. Teknik yang digunakan

Penghitungan jumlah bantuan keseluruhan, dilakukan dengan teknik pengolahan data sederhana (manual) atau jika data terlalu kompleks karena melibatkan jumlah dan jenis bantuan yang banyak, maka pengolahan data dapat menggunakan Statistical Package for Social Sciences (SPSS) atau teknik pengolahan data lain yang paling memungkinkan.

#### c. Waktu penghitungan

Penghitungan jumlah bantuan dilakukan setelah daftar penerima bantuan dan data jumlah setiap jenis bantuan terkumpul.

#### d. Pelaksana

Untuk dapat menghitung jumlah bantuan secara cermat, diperlukan orang-orang yang memiliki pengalaman dan terlatih dalam melakukan pengolahan data.

#### 4. Pendistribusian Bantuan

Pendistribusian bantuan harus cepat dan tepat serta sesuai dengan kondisi setempat, dengan melalui beberapa mekanisme:

- a. Penerima bantuan pangan diidentifikasi dan menjadi sasaran berdasarkan kebutuhan.
- b. Metode distribusi dirancang melalui konsultasi dengan kelompok-kelompok setempat, lembaga-lembaga mitra, dan melibatkan berbagai kelompok penerima.
- c. Titik-titik distribusi sedekat mungkin dengan hunian sementara penerima untuk memastikan akses yang mudah dan aman.
- d. Kualitas, jumlah jatah makanan/pangan dan rencana distribusi diinformasikan jauh sebelumnya kepada penerima bantuan.
- e. Kinerja dan efektifitas program bantuan pangan dimonitor dan dievaluasi dengan semestinya.

#### 5. Pencatatan dan Pelaporan

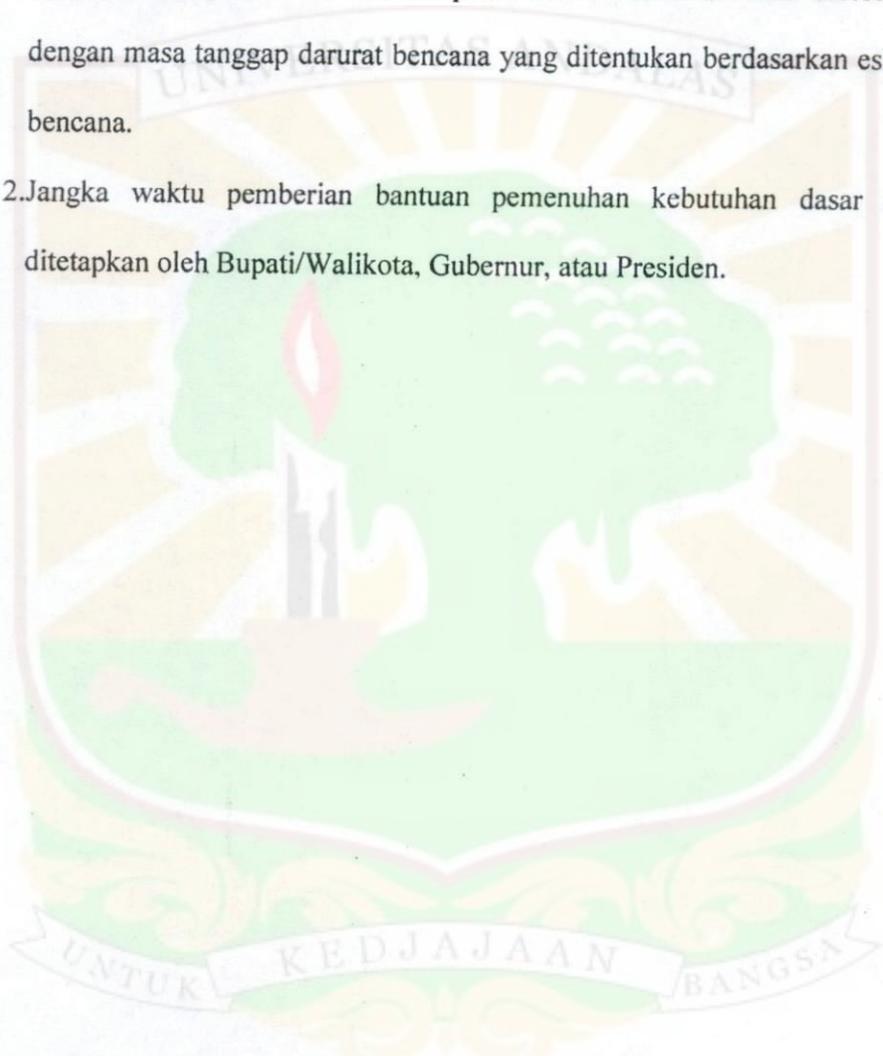
Kegiatan pencatatan dan pelaporan yang berkaitan dengan mekanisme pemberian bantuan mulai dari setiap tahap didokumentasikan ataupun dicatat dalam suatu dokumen sebagai bukti pertanggungjawaban sebagai berikut:

- a. Pencatatan penerimaan bantuan meliputi: pemberi bantuan, jumlah, dan jenis bantuan, serta waktu penyerahan bantuan.
- b. Pencatatan penyaluran meliputi : penerima bantuan, jumlah, dan jenis bantuan, waktu penyaluran, lokasi penyaluran bantuan, serta penanggungjawab (contact persons).
- c. Pencatatan persediaan logistik dan peralatan.

d. Pelaporan hasil penerimaan dan penyaluran bantuan disampaikan kepada SATLAK PB/BPBD kabupaten/kota, SATKORLAK PB/BPBD provinsi atau BNPB dengan tembusan lembaga/instansi yang memberi bantuan.

#### D. Waktu Pemberian Bantuan

1. Jangka waktu pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar disesuaikan dengan masa tanggap darurat bencana yang ditentukan berdasarkan eskalasi bencana.
2. Jangka waktu pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dapat ditetapkan oleh Bupati/Walikota, Gubernur, atau Presiden.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 JENIS PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk menggambarkan tentang pengelolaan program tanggap bencana PKPU cabang Padang secara kualitatif. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian studi kasus karena dilakukan penelitian terhadap salah satu sampel saja yaitu di PKPU cabang Padang.

#### **3.2 JENIS DATA DAN SUMBER DATA**

Penelitian tentang audit operasional atas pengelolaan program tanggap bencana di PKPU cabang Padang merupakan penelitian yang pertama dilakukan. Audit operasional dilakukan oleh PKPU Pusat di Jakarta terhadap PKPU Cabang Padang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat primer berupa bukti- bukti dan dokumentasi lain yang mendukung dan data sekunder yang berupa wawancara dengan masyarakat serta beberapa dokumentasi dari media cetak.

#### **3.3 WAKTU PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 30 November 2010 sampai 4 Maret 2011.

#### **3.4 METODE PENGUMPULAN DATA**

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

- 1) Studi Kepustakaan/ Studi Literatur

Untuk memperoleh literatur yang relevan dan mendukung mengenai audit operasional dan peraturan pemerintah mengenai standar dan aturan tanggap bencana serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan berinteraksi langsung dengan auditee yang bersangkutan, seperti kepala bidang pendayagunaan dan karyawan yang bertugas pada program tanggap bencana di PKPU cabang Padang. Selain itu, juga dilakukan wawancara dengan masyarakat guna mendapatkan data maupun informasi lainnya yang dirasa mendukung penelitian ini.

3) Observasi

Melakukan pengamatan langsung ke lapangan berkenaan dengan implementasi program tanggap bencana guna mendapatkan data pasti yang reliable.

### 3.5 ANALISIS DATA

Penelitian ini dilakukan langsung oleh peneliti. Data dan dokumen yang didapatkan dibandingkan dengan standar prosedur yang telah ditetapkan oleh PKPU Pusat maupun aturan tersendiri dari PKPU cabang Padang. Data berupa program kerja tanggap bencana PKPU cabang Padang akan dibandingkan dengan realisasi program tersebut dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan maupun dengan wawancara dengan pihak yang terkait, sehingga dari analisis data tersebut akan diperoleh temuan-temuan audit yang hasil akhirnya adalah memberikan rekomendasi atas temuan tersebut demi perbaikan di masa yang akan datang.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Pos Keadilan Peduli Ummat ( PKPU ) Sumatera Barat

##### 4.1.1 Sejarah Singkat

PKPU adalah lembaga kemanusiaan dan amil zakat nasional yang fokus memberikan kepedulian kepada setiap individu yang membutuhkan bantuan baik akibat bencana alam, konflik, korban perang, para penderita penyakit ataupun kemiskinan yang berdiri tanggal 10 Desember 1999. Terdaftar sebagai lembaga sosial yang sah dan resmi oleh pemerintah melalui SK Menteri Agama No.141 tahun 2001.

Pada selasa, 21 Juli 2008, Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU telah memperoleh register di PBB sebagai lembaga dengan status "Special Consultative Status" dari Economic and Social Council (Ecosoc). Kemudian pada tahun 2010, PKPU juga telah resmi terdaftar sebagai Organisasi Sosial Nasional.<sup>19</sup>

PKPU berkantor pusat di Jakarta dan memiliki cabang yang menyebar diseluruh wilayah Indonesia. Diantaranya PKPU Bandung, PKPU Semarang, PKPU Yogyakarta, PKPU Surabaya, PKPU Aceh, PKPU Medan, PKPU Padang, PKPU Bukittinggi, PKPU Manado, PKPU Bengkulu, PKPU Kendari, PKPU Palu PKPU Ambon dan PKPU Makasar. Salah satunya adalah PKPU cabang Padang di Jl. Siteba Padang.<sup>20</sup> . PKPU terus memujudkan visinya sebagai lembaga terpercaya dalam membangun kemandirian.

---

<sup>19</sup> Berdasarkan keputusan Menteri Sosial RI No 08/Huk/2010.

<sup>20</sup> Dengan SK No 451 tahun 2002 dari pemerintah Sumatera Barat, sebagai lembaga kemanusiaan dan amil zakat nasional.

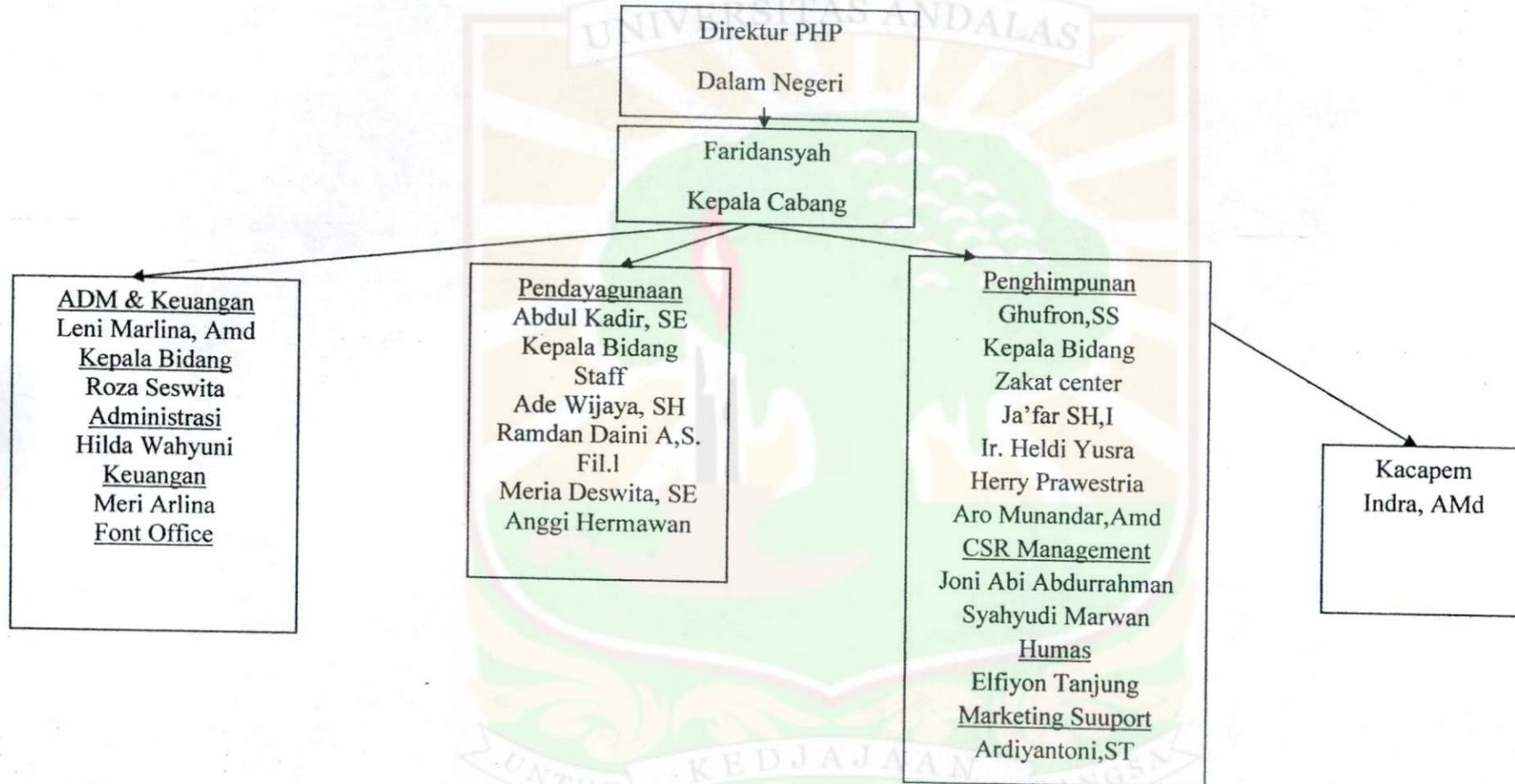
Kiprah PKPU sebagai penggiat kemanusiaan terukir jelas dalam partisipasinya berdampingan dengan NGO Internasional dari mancanegara mengatasi keadaan darurat tanggap bencana serta fase pembangunan kembali bencana-bencana besar yang menimpa tanah air seperti gempa bumi dan tsunami di Aceh, Yogyakarta, dan beberapa peristiwa lainnya.

Sebagai lembaga yang semakin kokoh dalam menangani isu-isu kemanusiaan global maka tuntutan standarisasi kerja serta pengembangan program telah membuat PKPU untuk melakukan peningkatan mutu program dan layanan dengan menghasilkan kontribusi yang solutif bagi masyarakat.

Target utama dari PKPU adalah terbangunnya masyarakat yang mandiri dari golongan masyarakat lemah, dhuafa dan mustahik. Tidak hanya itu kemandirian yang ingin dicapai juga kemandirian secara lembaga. PKPU memiliki budaya kerja dalam menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat secara profesional, diantaranya adalah ikhlas, adil, tawazun, tanggung jawab, jujur, ukhuwah, kreatif dan inovatif, proaktif, dan cepat serta inklusif, dengan SDM yang terlatih PKPU selalu siap, sigap dan rapi dalam memberikan bantuan seperti evakuasi pada korban bencana, mendistribusikan logistik, memberdayakan ekonomi masyarakat, memberdayakan pendidikan, maupun pelayanan kesehatan tanpa memandang suku, agama, ras dan gender. Berbagi kepedulian kepada sesama pada bulan ramadhan juga turut digulirkan serta pendistribusian daging kurban saat Idul Adha yang berskala nasional. PKPU juga bekerja sama dengan lembaga yang mempunyai komitmen dalam pengentasan kemiskinan dan kemandirian masyarakat.

#### 4.1.2 Struktur Organisasi

### PKPU SUMBAR Struktur Organisasi Tahun 2010



#### 4.1.3 Visi, Misi dan Moto

Visi : menjadi lembaga terpercaya dalam membangun kemandirian

Misi :

- a) Mendayagunakan program rescue, rehabilitasi dan pemberdayaan untuk mengembangkan kemandirian
- b) Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat, perusahaan, pemerintah dan NGO dalam dan luar negeri
- c) Memberikan pelayanan informasi, edukasi dan advokasi kepada masyarakat penerima manfaat (*beneficiaries*)

PKPU memiliki 4 strategi pemberdayaan masyarakat :

- 1) pengumpulan data
  - a) Zakat, Infak, Shadqah ( ZIS ) dan waqaf
  - b) Dana bantuan bencana alam dan kemanusiaan
  - c) Pakaian, bahan pangan ( pokok ) dan obat-obatan
  - d) Hewan Qurban
- 2) Misi penyelamatan kemanusiaan
  - a) Daerah konflik
  - b) Daerah-daerah bencana alam
  - c) Daerah –daerah minus
- 3) Rehabilitasi Kemanusiaan
  - a) Rehabilitasi kesehatan dan fasilitas air minum
  - b) Rehabilitasi fasilitas pendidikan
  - c) Rehabilitasi fasilitas ibadah
  - d) Rehabilitasi fasilitas ekonomi

- 4) Pembangunan Masyarakat
  - a) Pemberdayaan ekonomi masyarakat
  - b) Pendidikan alternative
  - c) Pembangunan pelayanan alternatif
  - d) Distribusi hewan qurban

Moto : Menggugah Nurani Menebar Peduli

#### 4.1.4 Program Kerja

Ada empat program kerja yang dilakukan oleh PKPU Padang yaitu :

1. Rescue

Program Resceu : *CBDRM (Community Based Disaster Risk Management)*

Penanggulangan resiko bencana bagi komunitas merupakan upaya pemandirian masyarakat dalam menghadapi risiko bencana yang kerap mereka hadapi. Komunitas terlibat langsung sejak perencanaan program hingga pelaksanaannya. Sehingga mengurangi kerentanan dan mmeperkuat kapasitas komunitas dan upaya menghindari ketergantungan komunitas terhadap pihak eksternal.

Tujuan dari program ini adalah sebagai berikut :

- 1) Mengalihkan kesigapan penanganan bencana dai para penggiat tanggap darurat bencana kepada masyarakat potensi korban bencana
  - 2) Mengurangi dan memperkuat kapasitas komunitas
  - 3) Menghindari upaya ketergantungan komunitas pada pihak eksternal
2. Kesehatan

Program kesehatan terpadu dengan menitikberatkan pada program kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitattif dan kedaruratan medis.

a) BUDARZI ( Ibu Sadar Gizi)

Program BUDARZI adalah program peningkatan ulaitas masyarakat yang bertujuan untuk :

- a) Pemeliharaan dan perbaikan status gizi balita
- b) Peningkatan pengetahuan ibu tentang permasalahan gisi dan kesehatan
- c) Pemberdayaan kader lokal

Kader Budarzi adalah Kader Gizi dari desa setempat yang dibina secara khusus untuk dapat menerima dan menerapkan inovasi program budarzi untuk menjaga sustainable program jika telah dinyatakan mandiri.

b) PROSMILING TERPADU ( Program Kesehatan Masyarakat Keliling Terpadu )

Program Kesehatan Masyarakat Keliling Terpadu (PROSMILING TERPADU) adalah program pelayanan kesehatan keliling yang dilaksanakan secara terpadu dan dilaksanakan secara cuma-cuma bagi masyarakat fakir miskin yang tempat tinggalnya jauh dari aksese pelayanan kesehatan.

Layanan kesehatannya meliputi :

- a) Penyuluhan kesehatan umum
- b) Pemeriksaan dan pengobatan umum
- c) Pemeriksaan kesehatan gigi
- d) Pemeriksaan gizi balita dan ibu hamil/menyusui
- e) Pemberian makanan tambahan (PMT)
- f) Penimbangan balita

g) Upaya pencegahan penyakit menular (fogging dan pemberian pupuk abate)

c) Program Komunitas Hijau /*Green Community*

Komunitas hijau atau *green community* adalah program pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada perubahan perilaku masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat serta perbaikan kondisi lingkungan tempat tinggal masyarakat. Program ini diberlakukan di daerah miskin dan membutuhkan perhatian berupa pendampingan dalam hal kesehatan lingkungan.

3. Ekonomi

a. PROSPEK (Program sinergis pemberdayaan Ekonomi Komunitas)

Program sinergis pemberdayaan ekonomi komunitas adalah sebuah program pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada kelompok masyarakat (dhuafa) dalam bentuk penyadaran, pendampingan dan peningkatan kapasitas, pendayaan serta intervensi modal dana bergulir, peningkatan kualitas produk dan perluasan pasar. Kelompok binaan diwadahi dalam koperasi dhuafa (BUSRA).

b. Balai Latihan Kerja/ *learning center*

Merupakan program pendidikan alternatif berupa pelatihan keterampilan sehingga memiliki keahlian yang spesifik.

4. Pendidikan

1) Sekolah berbasis komunitas

Konsep pendidikan berbasis komunitas yang mengacu kepada pemberdayaan komunitas dan kearifan lokal sehingga menjadi berdaya dan mampu memecahkan persoalan-persoalan pendidikan yang dihadapi.



Program pendidikan diarahkan untuk mendukung tercapainya program pendidikan dasar untuk semua dan mewujudkan masyarakat yang memiliki karakter yang cerdas, tangguh, kompetitif, bermoral serta berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

2) Program santunan guru

Pemberian santunan untuk guru-guru honorer di daerah terpencil, guru-guru madrasah dan pesantren yang memiliki dedikasi untuk kemajuan pendidikan bangsa.

3) Program orang tua asuh

Program orang tua asuh untuk anak-anak Indonesia yang berprestasi bertujuan untuk mencarikan orang tua asuh bagi anak-anak berprestasi yang terancam putus sekolah secara berkesinambungan.

4) Voucher Belanja Yatim

Voucher belanja Yatim adalah program pemberian voucher belanja untuk anak-anak yatim sehingga mereka dapat membeli barang yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka menjelang hari raya Idul Fitri dan hari raya anak yatim (Muharram).

5) Voucher pendidikan yatim

Voucher pendidikan yatim adalah pemberian voucher untuk dibelanjakan alat-alat sekolah sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga menunjang kegiatan belajar mereka.

#### 4.2 Dekripsi Kerja Bidang pada PKPU Cabang Padang<sup>21</sup>

##### 1. Kepala Cabang

Kepala Cabang PKPU Cabang Padang mempunyai kewajiban dan wewenang sebagai berikut :

- 1) sebagai pengambil kebijakan lembaga
- 2) mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan
- 3) bertanggung jawab dalam hal hubungan antara organisasi lokal, organisasi dalam negeri dan luar negeri baik *Government Organization* dan *Non Government Organization*
- 4) mempunyai tanggung jawab untuk memimpin rapat direksi
- 5) bertanggung jawab dalam hubungan PKPU cabang Padang dengan organisasi yayasan

##### 2. Bagian Keuangan

Bagian keuangan ini mempunyai tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut :

- 1) Bertanggung jawab dalam hal penggajian karyawan
- 2) Melakukan audit keuangan
- 3) Bertanggung jawab membuat laporan keuangan organisasi
- 4) Melakukan penerimaan keuangan
- 5) Bertanggung jawab terhadap budgeting organisasi
- 6) Mengelola keuangan organisasi dengan prinsip akuntansi yang benar
- 7) Merupakan bagian perbendaharaan
- 8) Melakukan pembayaran tagihan dan bertanggung jawab terhadap claim

---

<sup>21</sup> Referensi dari informasi tertulis dari Bagian Administrasi dan Umum PKPU cabang Padang

3. Bagian administrasi dan Sumber daya manusia organisasi ( SDMO)

Bagian ini mempunyai dua wilayah kerja yaitu administrasi organisasi dan mengelola SDM organisasi. Administrasi dan SDMO mempunyai tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut :

- 1) Melakukan manajemen terhadap PSDM
- 2) Bertanggung jawab terhadap development organisasi
- 3) Bertanggung jawab terhadap pengendali manajemen mutu
- 4) Merupakan bagian administrasi kepegawaian
- 5) Bagian tinjauan manajemen
- 6) Bertanggung jawab dalam Sistem Informasi Manajemen
- 7) Bertanggung jawab terhadap komunikasi organisasi secara internal
- 8) Bertanggung jawab terhadap laporan organisasi/ kelembagaan
- 9) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan fasilitas
- 10) Bertanggung jawab terhadap kearsipan lembaga
- 11) Merupakan bagian yang bertanggung jawab terhadap kerumahtanggaan organisasi
- 12) Pusat dari ketatausahaan

4. Bagian penghimpunan

Bagian penghimpunan bertanggung jawab dan mempunyai wewenang sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penghimpunan dana personal
- 2) Bertanggung jawab melakukan penghimpunan dana korporat/CSR
- 3) Bertanggung jawab terhadap penghimpunan dana kumpulan
- 4) Melayani dan bertanggung jawab terhadap komplain donatur

- 5) Bertanggung jawab terhadap database donatur
  - 6) Merupakan bagian marketing public relation/marketing support
  - 7) Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pameran
  - 8) Bertanggung jawab terhadap penerbitan media komunikasi donatur
5. Bagian pendayagunaan

Bagian pendayagunaan mempunyai tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Bertanggung jawab terhadap penanganan bencana
  - 2) Bertanggung jawab terhadap layanan dan data mustahik
  - 3) Bertanggung jawab terhadap wakaf dan dakwah
  - 4) Melakukan rehabilitasi fisik
  - 5) Melakukan pembinaan insani
  - 6) Melakukan sosialisasi program PDG
  - 7) Bertanggung jawab terhadap program PROSPEK
  - 8) Bertanggung jawab membuat laporan dan proposal program
  - 9) Bertanggung jawab terhadap program terintegrasi lainnya.
6. Bagian HUMAS dan Media Center
- Bagian Hubungan Masyarakat dan Media Center bertanggung jawab dan berwenang sebagai berikut :
- 1) Melakukan support terhadap kepala cabang
  - 2) Bertanggung jawab terhadap hubungan organisasi eksternal
  - 3) Bertanggung jawab terhadap organisasi cabang
  - 4) Bertanggung jawab menjalin dan menjaga hubungan dengan tokoh masyarakat

- 5) Menjaga performa atau citra eksternal organisasi
- 6) Bertanggung jawab terhadap hubungan organisasi dakwah
- 7) Merupakan pusat informasi lembaga
- 8) Merupakan media center lembaga
- 9) Membuat laporan program dengan media
- 10) Menjalin hubungan dengan *goverment organization* dan *non goverment organization* lainnya.

#### 4.3 Pengelolaan Tanggap Bencana pada PKPU Cabang Padang

Tidak seperti halnya dalam penanggulangan bencana standar yang dilakukan oleh instansi pemerintah. PKPU cabang Padang tidak mempunyai standar tersendiri, hanya saja aturan tersebut langsung berasal dari PKPU Pusat di Jakarta. Jika terjadi bencana yang berskala Nasional, maka akan ada koordinasi langsung dengan PKPU Pusat untuk segera melakukan aktivitas tanggap bencana. Maka ada 3 program yang dalam menanggulangi bencana tersebut<sup>22</sup> :

1. emergency response selama 2 pekan

Fase Tanggap Darurat selama 2 pekan dengan aktivitas utama adalah evakuasi korban dan Life saving para warga yang masih selamat serta penyediaan kebutuhan logistik bagi pengungsi.

2. Rehabilitasi selama 6 bulan

Tahapan menyiapkan dan memfasilitasi kebutuhan dasar masyarakat untuk mengembalikan kepercayaan agar pulih dari masa sulit setelah bencana.

---

<sup>22</sup> Informasi ini diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan kepala divisi Pemberdayaan PKPU cabang Padang. Prosedur tanggap darurat bencana PKPU untuk bencana skala nasional langsung diturunkan dari PKPU Pusat di Jakarta, prosedue tertulis tidak ada.

### 3. Re-development selama 1 tahun

Tahapan pembangunan kembali fasilitas infrastruktur dasar masyarakat serta pemulihan kegiatan ekonomi masyarakat.

Disaat mendapatkan kabar terjadinya bencana alam, maka PKPU cabang Padang akan segera mengirimkan tim untuk terjun langsung ke tempat terjadinya bencana. Tim ini bertugas untuk mendapatkan gambaran pasti tentang kejadian, korban maupun kebutuhan dilapangan. Tidak semua kejadian bencana alam yang menjadi perhatian PKPU cabang Padang, hanya bencana alam yang memenuhi kriteria seperti bencana alam yang banyak menghancurkan rumah penduduk, masyarakat yang terisolir dalam waktu yang cukup lama sehingga kehabisan pasokan makanan, dan sebagainya.

#### **4.4 Pelaksanaan Audit Operasional atas Tanggap Bencana Padang Pariaman tahun 2009 oleh PKPU Cabang Padang.**

Ada beberapa langkah yang harus ditempuh untuk secara bertahap dalam audit operasional agar dapat memberikan perbaikan yang membangun bagi auditee. Ruang lingkup yang akan diperiksa adalah 3 aktivitas utama tanggap bencana yang dilakukan oleh PKPU cabang Padang. 3 aktivitas utama itu adalah :

1. Emergency respon
2. Rehabilitasi
3. Re-development

Pemeriksaan diarahkan pada pihak pengelola yang terlibat di dalamnya, dokumen yang terkait dan prosedur pengendalian. Langkah yang dilakukan dalam melaksanakan audit operasional terhadap pengelolaan tanggap darurat

bencana gempa Padang Pariaman tahun 2009 pada PKPU cabang Padang adalah sebagai berikut<sup>23</sup> :

- 1) Tahap perencanaan audit
- 2) Tahap pelaksanaan audit
- 3) Tahap pelaporan audit

#### **4.4.1 Tahap Perencanaan Audit**

Tahap ini dilakukan dengan studi pendahuluan mengenai pengelolaan tanggap bencana atau program rescue di PKPU Cabang Padang dan pemahaman mengenai pengendalian internal organisasi yang berkaitan dengan program penanggulangan bencana. Pemahaman awal diperoleh dengan memahami struktur organisasi PKPU cabang Padang. Dalam tahapan ini didapatkan data tentang :

1. Gambaran umum tentang PKPU cabang Padang<sup>24</sup>
2. Struktur organisasi PKPU cabang Padang<sup>25</sup>
3. Program kerja serta visi dan misi PKPU cabang Padang<sup>26</sup>
4. Tahapan pelaksanaan tanggap bencana yang bersifat skala nasional
5. Gambaran umum mengenai pengendalian internal yang terkait dengan program tangga bencana.

#### **Gambaran mengenai pengendalian internal PKPU cabang Padang terkait dengan program Penanggulangan Bencana**

- 1) Pengendalian terhadap donasi/kas

Dana donasi yang berasal dari eksternal PKPU<sup>27</sup> diterima langsung oleh kepala cabang PKPU atau manajer pemberdayaan. Dana tersebut dicatat oleh

<sup>23</sup> Merujuk pada penelitian oleh Lusi Desriani mengenai Audit Operasional atas Pengelolaan Zakat pada PKPU Sumatera Barat tahun 2009.

<sup>24</sup> Gambaran umum tentang PKPU diterangkan pada hal 50

<sup>25</sup> Struktur organisasi PKPU dijelaskan pada hal 52

<sup>26</sup> Program kerja PKPU dijelaskan pada halaman 54

bagian keuangan dengan membuat 2 rangkap bukti penerimaan. Satu diberikan kepada donatur dan satu lagi disimpan sebagai bukti guna pencatatan. Bagian keuangan mencatat dana donasi tersebut dalam perkiraan khusus yang dipisahkan dari dana/kas lain. Dana tersebut dikumpulkan dalam perkiraan yang dinamakan perkiraan tanggap bencana, setiap dana yang keluar harus atas otorisasi manajer keuangan, jika dana yang keluar lebih dari Rp.5000.000,- maka harus menyertakan tanda tangan dari kepala cabang PKPU Padang. PKPU akan membuat laporan secara tertulis mengenai dana yang telah disalurkan kepada donatur.

2) Pengendalian terhadap persediaan bantuan

Setiap bantuan yang datang ke PKPU cabang Padang dicatat langsung secara fisik oleh staf bagian pemberdayaan yang kemudian persediaan tersebut disimpan dalam sebuah gudang. Setiap barang yang keluar untuk disalurkan akan dicatat oleh staf tersebut dan harus atas persetujuan dari manajer pemberdayaan.

3) Pengendalian terhadap realisasi program

Pelaksanaan dan realisasi program akan dievaluasi oleh PKPU Cabang Padang pada rapat berkala yang nantinya laporan tersebut akan dikirimkan ke PKPU Pusat di Jakarta.

Data tersebut diperoleh dengan wawancara dengan manajer bagian Pemberdayaan PKPU cabang Padang dan dokumen-dokumen yang telah didapatkan dari bagian administrasi umum baik secara tertulis maupun secara lisan. Audit ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang

---

<sup>27</sup> Dana donasi yang berasal dari pihak eksternal, bukan donasi yang diberikan oleh PKPU Jakarta maupun PKPU cabang lainnya, bencana gempa tahun 2009 merupakan bencana berskala nasional sehingga PKPU mengerahkan potensi cabangnya di seluruh Indonesia.

objek audit dengan pengumpulan informasi yang berkaitan dengan kegiatan, program dan fungsi dari masing-masing struktur yang ada.

#### 5.4.2 Tahap Pelaksanaan Audit

Informasi dalam tahap audit ini diperoleh dengan cara melakukan pengamatan langsung kelapangan dan melakukan wawancara terhadap kepala divisi, karyawan, relawan dan masyarakat.

##### Pembicaraan pendahuluan

Pembicaraan pendahuluan dilakukan pada bagian administrasi dan keuangan yang mempunyai tugas untuk mencatat administrasi dan bertanggung jawab terhadap pencatatan keuangan.

- 1) Pengumpulan informasi umum tentang program

Di PKPU cabang Padang ada 3 tahapan dalam melakukan tanggap bencana yaitu<sup>28</sup>,

1. Emergency response

Melakukan aktivitas pertolongan pertama terhadap korban bencana. Untuk kasus bencana gempa Padang tahun 2009 kemarin, PKPU cabang Padang langsung berkoordinasi dengan PKPU pusat di Jakarta untuk melakukan tindakan. Tidak ada prosedur tersendiri yang dimiliki PKPU cabang Padang sehingga harus menunggu tim dari pusat di Jakarta. Dalam tanggap bencana gempa tahun 2009 ini PKPU terdiri atas 2 tim yaitu tim di Padang dan Padang Pariaman. Jika bencana yang bersifat skala nasional maka akan ada langsung supervisi yang dilakukan oleh PKPU Pusat di Jakarta, yang terdiri dari :

1. Kepala bagian pemberdayaan PKPU pusat dan beberapa orang staff

---

<sup>28</sup> Program tersebut merupakan program nasional PKPU pada setiap penanggulangan bencana alam, artinya bahwa program ini merupakan program turunan dari PKPU Pusat.

2. Tim humas PKPU Pusat
3. Kepala cabang PKPU Padang, manajer bagian pemberdayaan PKPU cabang Padang dan staf dari bagian humas

Sembari menunggu kedatangan tim dari Jakarta, PKPU cabang Padang pada 3 hari pertama langsung membuka posko untuk memberikan bantuan terhadap korban gempa yang ada di Padang, hal ini terjadi karena alat komunikasi pada saat itu belum begitu pulih sehingga PKPU cabang Padang lebih banyak melakukan evakuasi di Padang dengan 2 posko salah satunya di masjid Nurul Iman.

Pada hari ketiga pasca bencana tepatnya, PKPU cabang Padang membuka posko di daerah Lubuk Alung Padang Pariaman. Namun sebelum itu telah mengirimkan tim untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan di lokasi bencana dan mencari lokasi yang tepat dan strategis untuk mendirikan posko, lokasi yang belum dijamah oleh NGO atau lembaga lain, dengan tujuan untuk mengefektifkan aktivitas penyelamatan.

Selanjutnya PKPU cabang Padang melaksanakan koordinasi dengan tim yang datang dari Jakarta untuk langsung segera merancang program rehabilitasi yang akan dilaksanakan dan me-launching program tersebut setelah 10 hari kemudian.

Aktivitas yang dilakukan pada tahapan ini adalah melakukan penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, distribusi logistik, perlindungan dan melakukan pemulihan kesehatan dan mental. Emergency response di tetapkan selama 2 minggu.

PKPU cabang Padang maupun cabang Bukittinggi tidak memiliki relawan tetap yang akan senantiasa bisa dikerahkan jika terjadi bencana. Relawan yang

diberangkatkan untuk membantu aktivitas emergency response biasanya relawan yang dengan inisiatif sendiri untuk datang membantu.

Relawan-relawan tersebut datang ke kantor PKPU untuk mendaftarkan diri dan karyawan bagian administrasi yang menerima pendaftaran tersebut akan segera berkoordinasi dengan bagian pemberdayaan untuk memastikan jadwal keberangkatan ke lokasi bencana dan jadwal kepulangan kembali ke Padang. Relawan tersebut terdiri dari relawan yang memang berkomitmen dengan PKPU, kemudian bagian pemberdayaan melakukan koordinasi dengan relawan tersebut mengenai aktivitas apa yang akan dilakukan. Logistik relawan selama berada di lokasi bencana serta transportasinya akan ditanggung semua oleh PKPU.

### 3. Rehabilitasi

Dalam tahapan rehabilitasi ini program utama PKPU adalah dengan mendirikan shelter, sekolah darurat dan pemenuhan standar gizi terutama balita. Program yang memberikan bantuan kepada korban bencana yang mengalami kerusakan rumah dengan kriteria yang ditetapkan oleh PKPU. Dengan berbagai pertimbangan yang telah dilakukan pengamatan dilapangan oleh tim yang terdiri dari tim dari pusat di Jakarta dan tim dari PKPU cabang Padang.

Adapun kriteria bangunan atau rumah rusak yang dijadikan sebagai syarat untuk membantu korban bencana mendirikan shelter adalah sebagai berikut<sup>29</sup> :

- 1) Atapnya menyentuh tanah
- 2) Ada bayi di dalam rumah dengan umur maksimal 12 bulan
- 3) Diprioritaskan rumah yang banyak penghuninya
- 4) Rumah yang didalamnya ada orang tua jompo yang rentan

---

<sup>29</sup> Kriteria ini tidak bersifat baku, bergantung kepada analisis dari kondisi korban dan lokasi bencana.

Kriteria utama adalah kriteria pada poin 1 dan 2, sedangkan kriteria 3 dan 4 adalah kriteria tambahan yang menjadi pertimbangan dengan melihat kebutuhan dan kondisi keadaan bencana. Dengan pemahaman bahwa kriteria pertama dan kedua terpenuhi. Kriteria yang ditetapkan tadi tidak semuanya berlaku di daerah yang dekat dengan akses jalan utama, ternyata dengan kriteria rumah tersebut lebih banyak terdapat di daerah pinggiran yang jauh dari jangkauan donatur. Sehingga PKPU tidak memberlakukan kriteria seketat tersebut di daerah yang dekat dengan akses jalan utama. Program ini dinamakan rumah senyum.

Mendirikan sekolah darurat juga menjadi salah satu program yang dibentuk oleh PKPU, sudah 25 sekolah darurat yang dibangun PKPU di beberapa titik di daerah Padang Pariaman. 3 titik di daerah Sintuk Toboh Nan Gadang di SD 12 Sintuk Toboh Nan Gadang, PKPU mengadakan berbagai program dalam tahapan rehabilitasi diantaranya :

1. Trauma healing
2. Pemeriksaan kesehatan gratis
3. Memberikan makanan tambahan berupa biskuit dan susu
4. Menyediakan pustaka keliling bagi siswa SD

### 3.Re- Development

Aktivitas yang banyak mengarah pada pelaksanaan program pembangunan kembali infrastruktur dasar masyarakat dan pemulihan aktivitas ekonomi serta peningkatan kesehatan masyarakat dengan program-program yang telah dirancang oleh PKPU.

Program ekonomi menjadi target utama PKPU dengan cara memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat. Divisi pemberdayaan bertanggung jawab

dalam memantau perjalanan usaha tersebut. Ditargetkan tahun 2010 kemarin 50 KUMM (Kelompok Usaha Mandiri Masyarakat) yang terbentuk namun sampai tanggal 30 september (satu tahun sejak bencana 2009) sudah 10 KUMM yang telah dibentuk oleh PKPU.

Program lain adalah di bidang kesehatan yaitu Program Kesehatan Masyarakat Keliling Terpadu (*prosmiling*) yang meliputi<sup>30</sup>:

- 1) Penyuluhan kesehatan umum
  - 2) Pemeriksaan dan pengobatan umum
  - 3) Pemeriksaan gigi
  - 4) Pemeriksaan kesehatan balita
  - 5) Pemeriksaan ibu hamil dan menyusui
  - 6) Pemberiaan makanan tambahan
  - 7) Pencegahan penyakit menular
  - 8) Program Sagita (Sadar Gizi Ibu dan Balita)
- 2) Pengumpulan informasi umum tentang pembagian tugas dan tanggung jawab

Dalam pengelolaan tanggap bencana, ada 3 bagian yang terlibat didalamnya yaitu:

1. Bagian keuangan yang bertugas untuk melakukan pencatatan terhadap donasi yang diterima dari donatur. Semuanya dicatat dalam satu perkiraan yang dinamakan perkiraan tanggap bencana. Bagian keuangan yang bertanggung jawab membuat laporan ke donatur yang memiliki jumlah donasi yang cukup signifikan.

---

<sup>30</sup> Program tersebut dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak sponsor dan donatur yang mempercayakan ke PKPU, salah satu diantaranya adalah XL.

Realisasi penyaluran bantuan logistik untuk tahap emergency sudah terealisasi dengan baik dan dana yang terserap pada tahap emergency dan rehabilitasi ditaksir sebesar 75% dari total dana yang terkumpul. Sisa 25% lagi diberdayakan untuk program re-development dan ditambah dengan dana yang diperoleh dari zakat.

2. Bagian humas bertugas untuk mendokumentasikan, dan membuat press reales untuk media cetak maupun media elektronik.

3. Bagian pemberdayagunaan bertugas terhadap seluruh pelaksanaan program tanggap bencana, mulai dari distribusi logistik pada tahap emergency response sampai pada pelaksanaan program re-develpoment.

### 3) Pengujian Pengendalian

Pengujian pengendalian manajemen dimaksudkan untuk lebih memantapkan sasaran tentative pemeriksaan yang telah diidentifikasi pada tahap persiapan pemeriksaan. Pengujian pengendalian ini bertujuan untuk menilai efektifitas pengendalian manajemen dan lebih mengenali adanya kelemahan sehingga dapat dipastikan apakah suatu tentatif audit obyektive dapat terus dilanjutkan pada tahap pemeriksaan lanjutan, karena kurangnya bukti pendukung.

### 4) Kuisisioner untuk organisasi

Kuisisioner organisasi ini ditujukan untuk memastikan bahwa struktur organisasi sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan. Dari kuisisioner yang telah disebarakan, dapat diambil kesimpulan bahwa PKPU cabang Padang sudah sesuai dengan struktur yang telah di tetapkan oleh PKPU pusat di Jakarta.

5) Kuisisioner pelaksana tupoksi

Kusioner pelaksana tupoksi ini adalah untuk mengetahui bahwa bidang yang terlibat dalam tanggap bencana sudah melakukan tugasnya dengan semestinya. Ada 3 bidang yang terlibat dalam tanggap bencana yaitu, bidang keuangan, bidang pendayagunaan dan bidang humas.

Bidang keuangan sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah berlaku, dengan melakukan pencatatan terhadap donasi yang diterima dan dikeluarkan serta membuat laporan tertulis penggunaan donasi tersebut kepada donator. Bidang pendayagunaan juga telah melaksanakan tugas dengan semestinya dengan bertanggung jawab terhadap program tanggap bencana hingga re-develompment, namun ada beberapa targetan yang tidak tercapai karena keterlambatan dalam menyelesaikannya. Bidang humas pun sudah melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang ada dengan melakukan dokumentasi yang rapi dan memebuat press realse pada media cetak.

Tabel 4.1: Program K erja Audit

Program Kerja Pemeriksaan			
No.	Uraian	Waktu Pelaksanaan	
1	Perencanaan Audit/ Perencanaan Pemeriksaan		
	Tujuan : Untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan program tanggap bencana PKPU cabang Padang		
	Procedure audit yang dilakukan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pembicaraan pendahuluan dengan objek yang diaudit</li> <li>2. Mendapatkan informasi mengenai pengelolaan program tanggap bencana yang meliputi :</li> </ol>		

	<p>a) Emergency response dilakukan selama 1 minggu</p> <p>b) Rehabilitation dilakukan selama 6 bulan</p> <p>c) Re-development dilakukan selama 1 tahun dari waktu kejadian bencana</p> <p>3. Mendapatkan gambaran umum mengenai profil PKPU cabang Padang</p> <p>4. mendapatkan gambaran tentang struktur organisasi PKPU cabang Padang serta deskripsi tugas masing-masing bidang yang ada berkaitan dengan pengelolaan bencana</p> <p>5. program kerja secara keseluruhan PKPU cabang Padang</p>		
2	Pelaksanaan audit		
	<p>Tujuan :Untuk mengidentifikasi aspek-spek manajemen sehubungan dengan kegiatan program yang menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan yang masih mungkin diperbaiki atau ditingkatkan efisiensi dan kehematannya.</p> <p>Procedure audit yang dilakukan :</p> <p>a) melakukan wawancara dengan kepala bidang pemberdayaan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program tanggap darurat bencana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dari wawancara tersebut didapatkan informasi mengenai program tanggap bencana PKPU cabang Padang pada gempa 29 September 2009</li> <li>- Alur atau procedure tanggap darurat bencana PKPU cabang padang untuk bencana yang bersifat skala nasional</li> <li>- Bagian atau bidang yang terlibat dalam pengelolaan tanggap bencana yaitu bidang</li> </ul>		

pemberdayaan, bagian keuangan, dan humas.

b) Melakukan wawancara dengan bagian humas dan keuangan. Informasi yang didapatkan adalah sebagai berikut :

- Bagian keuangan membuat perkiraan tersendiri untuk dana yang masuk sebagai donasi untuk bencana
- Bagian keuangan juga membuat laporan secara tertulis kepada pihak donatur atas penggunaan dana.

c) Wawancara dengan masyarakat yang dibantu oleh PKPU cabang Padang pada bencana gempa tahun 2009

d) Kuisisioner pada organisasi pelaksana program

- Apakah struktur organisasi PKPU cabang Padang telah sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan
- Apakah tim penanggulangan bencana telah sesuai dengan komponen struktur yang ditetapkan
- Apakah bidang humas telah sesuai dengan komponen struktur yang telah ditetapkan
- Apakah bagian keuangan telah sesuai dengan komponen struktur yang telah ditetapkan

Jika yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang semestinya maka:

1. Teliti mengapa penyimpangan tersebut terjadi
2. Pastikan siapa yang bertanggung jawab
3. Tentukan potensi risiko nyata/potensial yang dapat timbul dari penyimpangan tersebut

e) Kuisisioner pelaksana tupoksi

- Apakah bagian pemberdayaan sudah

<p>melaksanakan tugasnya dengan smestinya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah bagian humas sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan semestinya</li> <li>- Apakah bagian keuangan sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ada</li> </ul> <p>Jika yang dilaksanakan tidak sesuai dngan semestinya maka :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teliti mengapa penyimpangan tersebut terjadi</li> <li>2. Pastikan siapa yang bertanggung jawab</li> <li>3. Tentukan potensi risiko nyata/potensial yang dapat timbul dari pentimpangan tersebut</li> </ol>	
---	--

Tabel 4.2: Kerta Kerja Pemeriksaan

Kertas Kerja Pemeriksaan			
No	Uraian	Tanggal Pemeriksaan	
1	Perencanaan Audit/ perencanaan pemeriksaan		
	Tujuan : Untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan program tanggap bencana PKPU cabang Padang		
	rocedure audit yang dilakukan: melakukan pembicaraan pendahuluan dengan objek yang diaudit	30 November 2010	
	1. Mendapatkan informasi mengenai pengelolaan program tanggap bencana yang meliputi : 1) Emergency response dilakukan selama 1 minggu 2) Rehabilitation dilakukan selama 6	2 & 6 Desember 2010	

Kertas Kerja Pemeriksaan			
No	Uraian	Tanggal Pemeriksaan	
	<p>bulan</p> <p>3) Re-develpoment dilakukan selama 1 tahun dari waktu kejadian bencana</p> <p>2. Mendapatkan gambaran umum mengenai profil PKPU cabang Padang</p> <p>3. mendapatkan gambaran tentang stuktur organisasi PKPU cabang Padang serta deskripsi tugas masing-masing bidang yang ada berkaitan dengan pengelolaan bencana</p> <p>4. program kerja secara keseluruhan PKPU cabang Padang.</p>		
2	Pelaksanaan audit		
	<p>Tujuan :</p> <p>Untuk mengidentifikasi aspek-spek manejemen sehubungan dengan kegiatan program yang menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan yang masih mungkin diperbaiki atau ditingkatkan efisiensi dan kehematannya.</p>		
	<p>Procedure audit yang dilakukan :</p> <p>Melakukan wawancara dengan kepala bidang pemberdayaan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program tanggap darurat bencana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dari wawancara tersebut didapatkan informasi mengenai program tanggap bencana PKPU cabang Padang pada gempa 29 September 2009</li> <li>- Alur atau procedure tanggap darurat bencana PKPU cabang padang untuk</li> </ul>		

**Kertas Kerja Pemeriksaan**

No	Uraian	Tanggal Pemeriksaan	
	<p>bencana yang bersifat skala nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagian atau bidang yang terlibat dalam pengelolaan tanggap bencana yaitu bidang pemberdayaan, bagian keuangan, dan humas.</li> </ul>		
	<p>Melakukan wawancara dengan bagian humas dan keuangan. Informasi yang didapatkan adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagian keuangan membuat perkiraan tersendiri untuk dana yang masuk sebagai donasi untuk bencana</li> <li>- Bagian keuangan juga membuat laporan secara tertulis kepada pihak donatur atas penggunaan dana.</li> </ul>	<p align="center">12 Januari 2011</p>	
	<p>Wawancara dengan masyarakat yang dibantu oleh PKPU cabang Padang pada bencana gempa tahun 2009</p>	<p align="center">4 Maret 2011</p>	
	<p>Kuisisioner pada organisasi pelaksana program</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah struktur organisasi PKPU cabang Padang telah sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan</li> <li>- Apakah tim penanggulangan bencana telah sesuai dengan komponen struktur yang ditetapkan</li> <li>- Apakah bidang humas telah sesuai dengan komponen struktur yang telah</li> </ul>	<p align="center">12 Januari 2011</p>	

**Kertas Kerja Pemeriksaan**

No	Uraian	Tanggal Pemeriksaan	
	<p>ditetapkan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah bagian keuangan telah sesuai dengan komponen struktur yang telah ditetapkan</li> </ul> <p>Jika yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang semestinya maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teliti mengapa penyimpangan tersebut terjadi</li> <li>2. Pastikan siapa yang bertanggung jawab</li> <li>3. Tentukan potensi risiko nyata/potensial yang dapat timbul dari penyimpangan tersebut</li> </ol> <p>Kuisisioner pelaksana tupoksi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah bagian pemberdayaan sudah melaksanakan tugasnya dengan semestinya</li> <li>- Apakah bagian humas sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan semestinya</li> <li>- Apakah bagian keuangan sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ada</li> </ul> <p>Jika yang dilaksanakan tidak sesuai dengan semestinya maka :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teliti mengapa penyimpangan tersebut terjadi</li> <li>2. Pastikan siapa yang bertanggung jawab</li> </ol>		

Kertas Kerja Pemeriksaan			
No	Uraian	Tanggal Pemeriksaan	
	3. Tentukan potensi risiko nyata/potensial yang dapat timbul dari pentimpangan tersebut		

#### 5.4.3 Melaporkan Temuan

Berdasarkan atas hasil audit diatas, maka ada beberapa temuan yang diperoleh terkait dengan pelaksanaan pengelolaan tanggap bencana PKPU cabang Padang di Padang pariaman pada gempa tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1) PKPU Cabang Padang tidak memiliki prosedur atau aturan tersendiri dalam tanggap bencana untuk skala nasional.

Prosedure dan aturan serta program yang akan dilaksanakan di tempat bencana menunggu konsolidasi dengan pusat PKPU di Jakarta sehingga butuh waktu yang untuk melakukan tindakan rescue. Karena PKPU cabang Padang membutuhkan koordinasi dengan cabang lain maupun Pusat untuk membantu dari sisi program bantuan, dana dan sebagainya.

Apalagi ditambah dengan komunikasi yang bermasalah ketika bencana karena alat komunikasi yang rusak dan akses jalan yang bermasalah.

2) PKPU tidak memiliki SDM yang mencukupi di bidang pemberdayaan.

Targetan PKPU pada tahun 2010 adalah membentuk 50 KUMM, namun sampai september 2010 hanya 10 KUMM yang terbentuk. Pembinaan terhadap

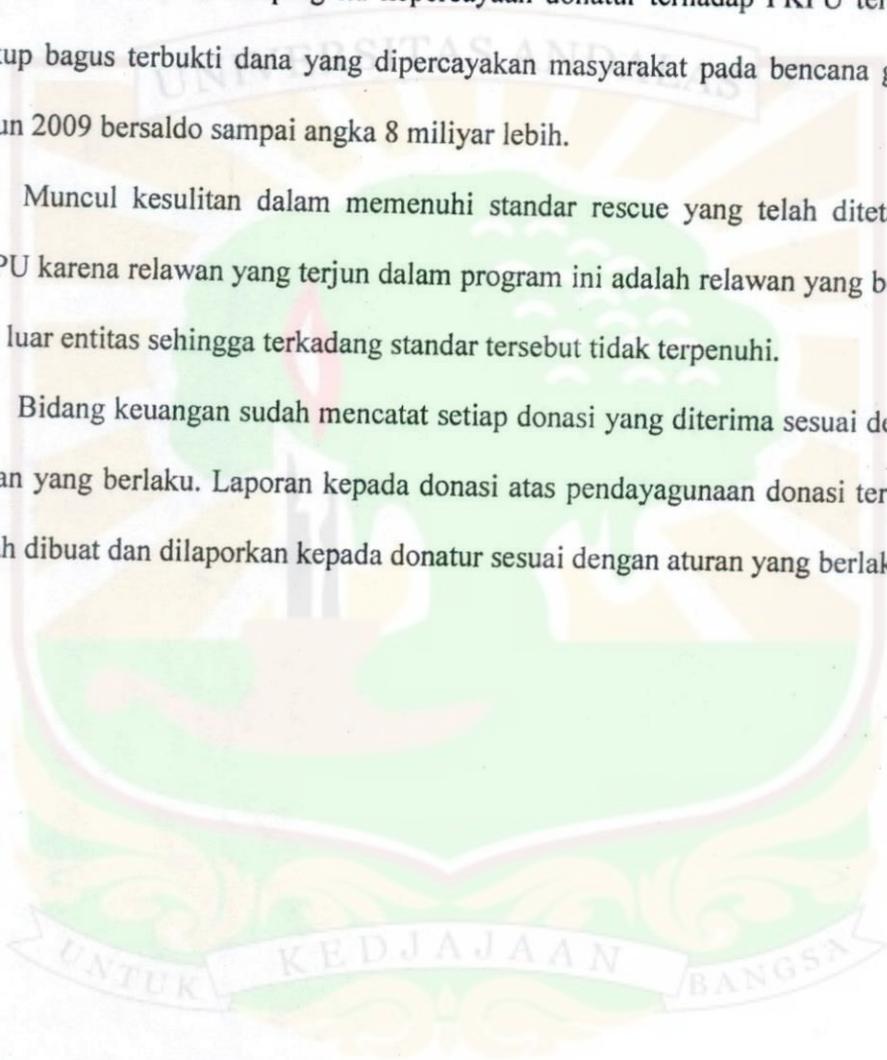
masyarakat serta pengontrolan pelaksanaan program bidang ekonomi ini kurang mampu berjalan dikarenakan SDM yang tidak memadai.

- 3) PKPU tidak memiliki tim khusus untuk pelaksanaan program rescue.

Sumatera Barat merupakan daerah yang memiliki potensi bencana alam yang cukup besar, dan sering belakangan ini terjadi bencana alam yang berstatus bencana nasional. Disamping itu kepercayaan donatur terhadap PKPU terbilang cukup bagus terbukti dana yang dipercayakan masyarakat pada bencana gempa tahun 2009 bersaldo sampai angka 8 miliar lebih.

Muncul kesulitan dalam memenuhi standar rescue yang telah ditetapkan PKPU karena relawan yang terjun dalam program ini adalah relawan yang berasal dari luar entitas sehingga terkadang standar tersebut tidak terpenuhi.

- 4) Bidang keuangan sudah mencatat setiap donasi yang diterima sesuai dengan aturan yang berlaku. Laporan kepada donasi atas pendayagunaan donasi tersebut sudah dibuat dan dilaporkan kepada donatur sesuai dengan aturan yang berlaku.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari penelitian mengenai audit operasional atas implementasi program tanggap bencana pada PKPU cabang Padang pada gempa tahun 2009 maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program tanggap bencana PKPU belum terlaksana dengan baik, karena dari program yang telah ditargetkan tidak semuanya terlaksana. Dan program yang menjadi tanggung jawab bidang pemberdayaan belum mampu direalisasikan dengan semestinya karena adanya keterbatasan dalam SDM.

#### **5.2 Saran**

Dari hasil audit atas implemementasi program tanggap bencana pada PKPU cabang Padang, maka penulis dapat memberikan saran untuk perbaikan di masa yang akan datang sehingga pelaksanaan program tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Saran tersebut antara lain :

- 1) Dalam melaksanakan sebuah rangkain program hendaknya PKPU cabang Padang mempunyai prosedur dan aturan yang tertulis untuk pelaksanaan program rescue yang berskala nasional. Mengingat potensi dana donasi yang dipercayai donatur kepada PKPU cabang Padang untuk mengelolanya cukup tinggi,yaitu mencapai angka 8 miliar dengan total dana dari donasi di SUMBAR sebesar Rp.400.000.000,-. Tidaknya hanya itu sumatera Barat juga merupakan daerah yang rawan terjadi bencana alam, yang intensitasnya cukup sering dan skala bancananya pun sering dikategorikan bencana nasional.

- 2) Untuk memenuhi standar yang lain sesuai dengan yang ditetapkan oleh PKPU, maka sebaiknya ada tim rescue yang tetap sehingga tim ini bisa diberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan standar tersebut. Dengan adanya tim rescue yang terlatih dan berpengalaman dapat melaksanakan program tanggap bencana tersebut dengan baik dan sesuai dengan targetan awal.
- 3) Sebaiknya ada penambahan SDM di bidang pendayagunaan, karena dengan SDM yang ada hari ini tidak mampu ternyata mengelola dan melakukan pendampingan terhadap program yang telah dirancang. Kurangnya SDM juga membuat beberapa program yang awalnya direncanakan tidak terealisasi karena keterlambatan koordinasi.
- 4) Dengan besarnya kepercayaan donatur kepada PKPU Cabang Padang untuk mendonasi bantuannya bagi program bencana alam, maka sebaiknya PKPU juga membuat laporan evaluasi penggunaan donasi tersebut tidak hanya untuk donatur yang memberikan donasi yang dalam jumlah besar, tapi juga sebaiknya untuk donatur yang memberikan donasi dalam jumlah yang tidak terlalu besar.

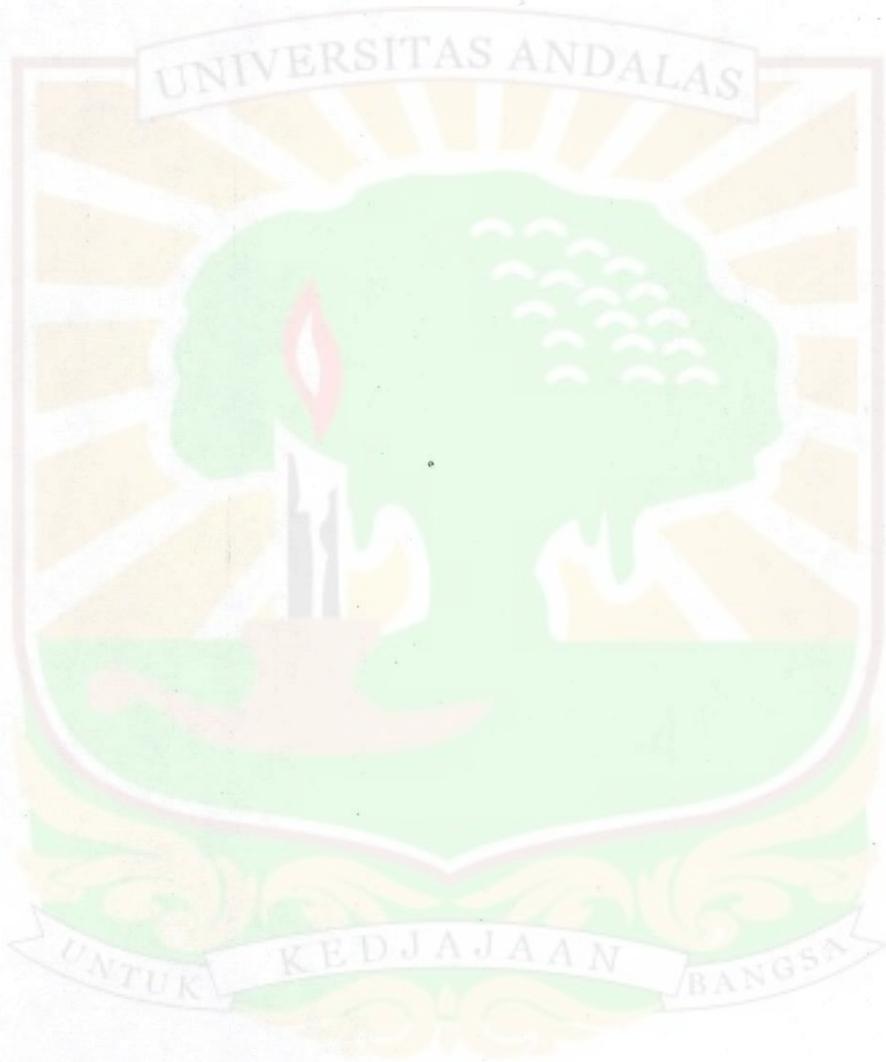
### **5.3 Implikasi**

Hasil penelitian ini bisa bermanfaat untuk PKPU cabang Padang untuk bahan rujukan perbaikan sehingga dapat membantu dalam melaksanakan program tanggap bencana dengan tepat sasaran dan efisien di masa yang akan datang.

### **5.4 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian studi kasus, sehingga ada data-data yang tidak bisa didapatkan. Dengan keterbatasan data dan informasi bisa jadi ada yang

luput dari perhatian sehingga tidak menggambarkan kondisi yang tepat. Selain itu penelitian ini tidak secara utuh melaksanakan tahapan dalam audit operasional, hanya sampai pada tahap membuat rekomendasi atas temuan yang didapatkan, namun tidak sampai pada impimentasi terhadap hasil rekomendasi.



## LAMPIRAN 1 : BUKTI AUDIT

a) Pengumpulan informasi umum ( didapat melalui wawancara )

Di PKPU cabang Padang ada 3 tahapan dalam melakukan tanggap bencana yaitu :

### 1. Emergency response

Melakukan aktivitas pertolongan pertama terhadap korban bencana. Untuk kasus bencana gempa Padang tahun 2009 kemarin, PKPU cabang Padang langsung berkoordinasi dengan PKPU pusat di Jakarta untuk melakukan tindakan. Tidak ada prosedur tersendiri yang dimiliki PKPU cabang Padang sehingga harus menunggu tim dari pusat di Jakarta. Dalam tanggap bencana gempa tahun 2009 ini PKPU terdiri atas 2 tim yaitu tim di Padang dan Padang Pariaman. Jika bencana yang bersifat skala nasional maka akan ada langsung supervisi yang dilakukan oleh PKPU Pusat di Jakarta, yang terdiri dari :

4. Kepala bagian pemberdayaan PKPU pusat dan beberapa orang staff
5. Tim humas PKPU Pusat
6. Kepala cabang PKPU Padang, manajer bagian pemberdayaan PKPU cabang Padang dan staf dari bagian humas

Sementara menunggu kedatangan tim dari Jakarta, PKPU cabang Padang pada 3 hari pertama langsung membuka posko untuk memberikan bantuan terhadap korban gempa yang ada di Padang, hal ini terjadi karena alat komunikasi pada saat itu belum begitu pulih sehingga PKPU cabang Padang lebih banyak melakukan evakuasi di Padang dengan 2 posko salah satunya di masjid Nurul Iman.

Pada hari ketiga pasca bencana tepatnya, PKPU cabang Padang membuka posko di daerah Lubuk Alung Padang Pariaman. Namun sebelum itu telah mengirimkan tim untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan di lokasi bencana dan mencari lokasi yang tepat dan strategis untuk mendirikan posko, lokasi yang belum dijamah oleh NGO atau lembaga lain, dengan tujuan untuk mengefektifkan aktivitas penyelamatan.

Selanjutnya PKPU cabang Padang melaksanakan koordinasi dengan tim yang datang dari Jakarta untuk langsung segera merancang program rehabilitasi yang akan dilaksanakan dan me-launching program tersebut setelah 10 hari kemudian. Aktivitas yang dilakukan pada tahapan ini adalah melakukan penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, distribusi logistik, perlindungan dan melakukan pemulihan kesehatan dan mental. Emergency response di tetapkan selama 2 minggu.

PKPU cabang Padang maupun cabang Bukittinggi tidak memiliki relawan tetap yang akan senantiasa bisa dikerahkan jika terjadi bencana. Relawan yang diberangkatkan untuk membantu aktivitas emergency response biasanya relawan yang dengan inisiatif sendiri untuk datang membantu.

Relawan-relawan tersebut datang ke kantor PKPU untuk mendaftarkan diri dan karyawan bagian administrasi yang menerima pendaftaran tersebut akan segera berkoordinasi dengan bagian pemberdayaan untuk memastikan jadwal keberangkatan ke lokasi bencana dan jadwal kepulangan kembali ke Padang. Relawan tersebut terdiri dari relawan yang memang berkomitmen dengan PKPU, kemudian bagian pemberdayaan melakukan koordinasi dengan relawan tersebut mengenai aktivitas apa yang akan dilakukan. Logistik relawan selama berada di lokasi bencana serta transportasinya akan ditanggung semua oleh PKPU.

Tercatat dalam data dalam tahap emergency response 122 orang relawan yang dikirim oleh PKPU SUMBAR dengan bantuan ambulance keliling, mobil evakuasi, tenda pleton XL, dan driver.

## 2. Rehabilitasi

Dalam tahapan rehabilitasi ini program utama PKPU adalah dengan mendirikan shelter, sekolah darurat dan pemenuhan standar gizi terutama balita. Program yang memberikan bantuan kepada korban bencana yang mengalami kerusakan rumah dengan kriteria yang ditetapkan oleh PKPU. Dengan berbagai pertimbangan yang telah dilakukan pengamatan dilapangan oleh tim yang terdiri dari tim dari pusat di Jakarta dan tim dari PKPU cabang Padang.

Adapun kriteria bangunan atau rumah rusak yang dijadikan sebagai syarat untuk membantu korban bencana mendirikan shelter adalah sebagai berikut :

- 5) Atapnya menyentuh tanah
- 6) Ada bayi di dalam rumah dengan umur maksimal 12 bulan
- 7) Diprioritaskan rumah yang banyak penghuninya
- 8) Rumah yang didalamnya ada orang tua jompo yang rentan

Kriteria utama adalah kriteria pada poin 1 dan 2, sedangkan kriteria 3 dan 4 adalah kriteria tambahan yang menjadi pertimbangan dengan melihat kebutuhan dan kondisi keadaan bencana. Dengan pemahaman bahwa kriteria pertama dan kedua terpenuhi. Kriteria yang ditetapkan tadi tidak semuanya berlaku di daerah yang dekat dengan akses jalan utama, ternyata dengan kriteria rumah tersebut lebih banyak terdapat di daerah pinggiran yang jauh dari jangkauan donatur.

Sehingga PKPU tidak memberlakukan kriteria seketat tersebut di daerah yang dekat dengan akses jalan utama. Program ini dinamakan rumah senyum.

Mendirikan sekolah darurat juga menjadi salah satu program yang dibentuk oleh PKPU, sudah 25 sekolah darurat yang dibangun PKPU di beberapa titik di daerah Padang Pariaman. 3 titik di daerah Sintuk Toboh Nan Gadang di SD 12 sintuk toboh nan gadang, PKPU mengadakan berbagai program dalam tahapan rehabilitasi diantaranya :

5. Trauma healing
6. Pemeriksaan kesehatan gratis
7. Memberikan makanan tambahan berupa biskuit dan susu
8. Menyediakan pustaka keliling bagi siswa SD

### 3.Re- Development

Aktivitas yang banyak mengarah pada pelaksanaan program pembangunan kembali infrastuktur dasar masyarakat dan pemulihan aktivitas ekonomi serta peningkatan kesehatan masyarakat masyarakat dengan program-program yang telah dirancang oleh PKPU.

Program lain adalah di bidang kesehatan yaitu Program Kesehatan Masyarakat Keliling Terpadu (*prosmiling*) yang meliputi :

- 9) Penyuluhan kesehatan umum
- 10) Pemeriksaan dan pengobatan umum
- 11) Pemeriksaan gigi
- 12) Pemeriksaan kesehatan balita
- 13) Pemeriksaan ibu hamil dan menyusui
- 14) Pemberiaan makanan tambahan
- 15) Pencegahan penyakit menular
- 16) Program Sagita ( Sadar Gizi Ibu dan Balita )

Program tersebut dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak sponsor dan donatur yang mempercayakan ke PKPU, salah satu diantaranya adalah XL.

b) Realisasi Program

Sampai tertanggal 30 September 2010 PKPU Cabang Padang sudah mendirikan 543 rumah darurat bagi masyarakat yang mengalami kerusakan rumah yang parah dan rawan untuk ditempati, program ini dinamakan dengan program rumah senyum. Selain itu data lokasi pembangunan sekolah darurat sebagai berikut :

- 1) SD N 01 Sungai Limau
- 2) SD N 01 Padang Sago
- 3) SMP N 2 Lubuk Alung
- 4) SD N 04 Lubuk Alung
- 5) SD N 05 Koto Buruk Hilir
- 6) SD N 06 Padang Sago
- 7) SD N 08 Lubuk Alung
- 8) SD N 10 VII Koto Sungai Larik
- 9) SD N 11 Sintuk Toboh Gadang
- 10) SD N 12 Lubuk Alung
- 11) SD N 12 Sintuk Toboh Gadang
- 12) SD N 13 Sintuk Toboh Gadang
- 13) SD N 14 VII Koto Sungai Sarik

- 14) SD N 16 Sintuk Toboh Gadang
- 15) SD N 17 Sintoga Lubuk Alung
- 16) SD N 17 Lubuk Alung
- 17) SD N 19 Lubuk Alung
- 18) SD N 24 Lubuk Alung
- 19) SD N 28 Lubuk Alung
- 20) SD N 33 Lubuk Alung
- 21) SD N 08 Nan Sabaris
- 22) SD N 1 Lolong
- 23) SD N 23 Lolong
- 24) SD N 25 Lolong
- 25) SD N 12 Sungai Sapih Padang
- 26) SD N 14 Kec 2 X 11 Kayu Tanam
- 27) SD N 17 Kec 2 X 11 Kayu Tanam
- 28) SD N 28 VII Koto Sungai Sarik
- 29) SD N 03 Sungai Limau
- 30) Pesantren Nuruk Yaqin
- 31) SMP N 7 Padang
- 32) SD N 02 Gunung Sarik
- 33) SD N 16 Gunung Sarik
- 34) TK Subussalam Padang Pariaman

Program ekonomi menjadi target utama PKPU dengan cara memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat. Divisi pemberdayaan bertanggung jawab dalam memantau perjalanan usaha tersebut. Ditargetkan tahun 2010 kemarin 50 KUMM ( Kelompok Usaha Mandiri Masyarakat ) yang terbentuk namun sampai tanggal 30 september ( satu tahun sejak bencana 2009 ) sudah 10 KUMM yang telah dibentuk oleh PKPU. Syarat yang diberikan kepada KUMM yang dibantu adalah sebagai berikut:

1. Proposal usaha
2. KTP
3. Usaha yang sudah berdiri namun terkendala modal, tidak untuk usaha yang baru dirintis.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Admawati, 2006, "Audit Operasional Pengelolaan Dana Program Kompensasi Subsidi Bahan Bakar Minyak bidang Kesehatan", Padang
- Arens, Alvin , Elder, Randal J dan Beasley, Mark S,2004, "Auditing dan Pelayanan Verifikasi", edisi kesembilan, Jakarta: Indeks
- Boyton, Johnson & Kell, 2002, "Modern Auditing", edisi tujuh, Jakarta: Erlangga
- Desriani, Lusy, 2010 " Audit Operasional atas Pengelolaam Zakat pada Pos Keadilan Peduli Ummat ( PKPU ) Sumatera Barat ", Padang
- Loebbecke dan Arens, 2000," Auditing Pendekatan Terpadu", Jakarta: Salemba Empat
- M.Guy, Dan, C.Wayne Alderman dan Alan J.Winters, 2003, "Auditing", edisi lima, Jakarta: Erlangga
- Mulyadi, 2008,"Auditing", edisi enam, Jakarta: Salemba Empat
- Prameswari, Mesa, 2008, " Audit Operasional atas prosedur pemberian kredit untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada PT BNI (Persero) Tbk wilayah 02 Padang", Padang
- Whittington, Oray & Kurt Pany, 2000, "Principle of Auditing thirteenth edition", Singapura: Mc Graw Hill

[http://www.sumbarprov.go.id/images/media/Perda-Prov-Sumbar\\_No-5-2007\\_Penanggulangan-Bencana.pdf](http://www.sumbarprov.go.id/images/media/Perda-Prov-Sumbar_No-5-2007_Penanggulangan-Bencana.pdf), diakses pada tanggal 23 November 2010

<http://ngeteh.files.wordpress.com/2010/11/perka-no-10.pdf>, diakses pada tanggal 23 November 2010

[http://portal.djmbp.esdm.go.id/sijh/PP21\\_2008PENYELENGGARAAN.pdf](http://portal.djmbp.esdm.go.id/sijh/PP21_2008PENYELENGGARAAN.pdf), diakses pada tanggal 23 November 2010



Dana yang terkumpul untuk bencana gempa 2009 adalah Rp.8.000.000.000,- dan Rp. 400.000.000,- diantaranya adalah donasi yang terkumpul secara mandiri oleh PKPU cabang Padang.

c) Kuisisioner

1. Kuisisioner untuk Organisasi

No	Uraian	Sesuai Petunjuk Pelaksanaan	
		Ya	Tidak
1	Apakah struktur organisasi PKPU cabang Padang telah sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan?	√	
2	Apakah tim penanggulangan bencana telah sesuai dengan komponen struktur yang ditetapkan?	√	
3	Apakah bidang humas telah sesuai dengan komponen struktur yang telah ditetapkan?	√	
4	Apakah bagian keuangan telah sesuai dengan komponen struktur yang telah ditetapkan?	√	

2. Kuisisioner untuk tupoksi

No	Uraian	Sesuai Job Description	
		Ya	Tidak
1	Apakah bagian pendayagunaan melakukan koordinasi dengan PKPU Pusat dalam tanggap bencana Nasional?	√	
2	Apakah bagian pendayagunaan	√	

	mengirim tim ke lokasi bencana untuk memastikan lokasi pendirian posko?		
3	Apakah bidang pendayagunaan melakukan penghimpunan relawan?	√	
4	Apakah bagian pendayagunaan sudah melakukan penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, distribusi logistik, perlindungan dan melakukan pemulihan kesehatan dan mental selama emergency respons?	√	
5	Apakah bagian pendayagunaan telah melaksanakan program tanggap darurat tahap rehabilitasi dan re-development?	√	
6	Apakah bidang pendayagunaan memberikan laporan program ke PKPU Pusat di Jakarta?	√	
7	Apakah bagian humas mendampingi tim tanggap bencana selama pelaksanaan program?	√	
8	Apakah bagian humas membuat press reless program tanggap bencana?	√	
9	Apakah bagian keuangan mencatat dana pemasukan donasi dan pengeluarannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan?	√	
10	Apakah bagian keuangan membuat laporan tertulis kepada donatur?	√	

## LAMPIRAN 2: LAPORAN AUDIT UNTUK PKPU CABANG PADANG

### LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Kepada Yth.

Pimpinan PKPU cabang Padang

Pada bulan Maret 2011 penulis telah menyelesaikan audit operasional terhadap kegiatan pengelolaan program tanggap bencana PKPU cabang Padang.

#### **Tujuan dan ruang Lingkup**

Audit ini dilaksanakan sesuai tujuan yang diinginkan perusahaan dan sejalan dengan tujuan manajemen perusahaan. Tujuan umum dari audit operasional adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan program tanggap bencana PKPU Cabang Padang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan telah menjalankan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien.

Audit yang dilakukan terbatas hanya terhadap kegiatan perusahaan yang terlibat dalam tanggap bencana yaitu bidang pendayagunaan, humas dan media dan bidang keuangan. Dalam melaksanakan audit operasional juga dilakukan pemeriksaan terhadap system pengendalian manajemen yang berhubungan dengan pengelolaan tanggap bencana. Di dalam laporan ini tidak disinggung mengenai kegiatan fungsi manajemen yang lain. Audit operasional yang dilakukan meliputi pembicaraan dengan penanggung jawab dari segala kebijakan dan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan program tanggap darurat bencana pada PKPU cabang Padang.

Setelah dilakukan pengumpulan data dan pengevaluasian segala macam informasi yang dibutuhkan dalam audit ini, seperti dokumen, arsip, system dan procedure yang mendasari kegiatan, peraturan yang melandasi kegiatan dan berbagai kebijaksanaan yang dipandang perlu. Setelah informasi yang terkumpul dianalisa, maka dapatlah penulis susun beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh manajemen.

## **Temuan dan Rekomendasi**

Temuan yang diperoleh hendaknya jadi perhatian dari pihak manajemen. Berdasarkan temuan tersebut, maka dibuatlah suatu rekomendasi. Rekomendasi dalam laporan ini adalah beberapa hal yang dapat dilaksanakan dalam rangka perbaikan dari objek yang diperiksa untuk operasi perusahaan selanjutnya.

### **Temuan**

- 5) PKPU Cabang Padang tidak memiliki prosedur atau aturan tersendiri dalam tanggap bencana untuk skala nasional.

Prosedure dan aturan serta program yang akan dilaksanakan di tempat bencana menunggu konsolidasi dengan pusat PKPU di Jakarta sehingga butuh waktu yang untuk melakukan tindakan rescue. Karena PKPU cabang Padang membutuhkan koordinasi dengan cabang lain maupun Pusat untuk membantu dari sisi program bantuan, dana dan sebagainya. Apalagi ditambah dengan komunikasi yang bermasalah ketika bencana karena alat komunikasi yang rusak dan akses jalan yang bermasalah.

- 6) PKPU tidak memiliki SDM yang mencukupi di bidang pemberdayaan.

Targetan PKPU pada tahun 2010 adalah membentuk 50 KUMM, namun sampai september 2010 hanya 10 KUMM yang terbentuk. Pembinaan terhadap masyarakat serta pengontrolan pelaksanaan program bidang ekonomi ini kurang mampu berjalan dikarenakan SDM yang tidak memadai.

- 7) PKPU tidak memiliki tim khusus untuk pelaksanaan program rescue.

Sumatera Barat merupakan daerah yang memiliki potensi bencana alam yang cukup besar, dan sering belakangan ini terjadi bencana alam yang berstatus bencana nasional. Disamping itu kepercayaan donatur terhadap PKPU terbilang cukup bagus terbukti dana yang dipercayakan masyarakat pada bencana gempa tahun 2009 bersaldo sampai angka 8 milyar lebih.

Muncul kesulitan dalam memenuhi standar rescue yang telah ditetapkan PKPU karena relawan yang terjun dalam program ini adalah relawan yang berasal dari luar entitas sehingga terkadang standar tersebut tidak terpenuhi.

## LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Kepada Yth.

Pimpinan PKPU cabang Padang

Pada bulan Maret 2011 penulis telah menyelesaikan audit operasional terhadap kegiatan pengelolaan program tanggap bencana PKPU cabang Padang.

### **Tujuan dan ruang Lingkup**

Audit ini dilaksanakan sesuai tujuan yang diinginkan perusahaan dan sejalan dengan tujuan manajemen perusahaan. Tujuan umum dari audit operasional adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan program tanggap bencana PKPU Cabang Padang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan telah menjalankan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien.

Audit yang dilakukan terbatas hanya terhadap kegiatan perusahaan yang terlibat dalam tanggap bencana yaitu bidang pendayagunaan, humas dan media dan bidang keuangan. Dalam melaksanakan audit operasional juga dilakukan pemeriksaan terhadap system pengendalian manajemen yang berhubungan dengan pengelolaan tanggap bencana. Di dalam laporan ini tidak disinggung mengenai kegiatan fungsi manajemen yang lain. Audit operasional yang dilakukan meliputi pembicaraan dengan penanggung jawab dari segala kebijakan dan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan program tanggap darurat bencana pada PKPU cabang Padang.

Setelah dilakukan pengumpulan data dan pengevaluasian segala macam informasi yang dibutuhkan dalam audit ini, seperti dokumen, arsip, system dan procedure yang mendasari kegiatan, peraturan yang melandasi kegiatan dan berbagai kebijaksanaan yang dipandang perlu. Setelah informasi yang terkumpul dianalisa, maka dapatlah penulis susun beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh manajemen.

- 8) Bidang keuangan sudah mencatat setiap donasi yang diterima sesuai dengan aturan yang berlaku. Laporan kepada donasi atas pendayagunaan donasi tersebut sudah dibuat dan dilaporkan kepada donatur sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### **Rekomendasi**

- 1) Dalam melaksanakan sebuah rangkaian program hendaknya PKPU cabang Padang mempunyai prosedur dan aturan yang tertulis untuk pelaksanaan program rescue yang berskala nasional. Mengingat potensi dana donasi yang dipercayai donatur kepada PKPU cabang Padang untuk mengelolanya cukup tinggi, yaitu mencapai angka 8 miliar dengan total dana dari donasi di SUMBAR sebesar Rp.400.000.000,-. Tidaknya hanya itu Sumatera Barat juga merupakan daerah yang rawan terjadi bencana alam, yang intensitasnya cukup sering dan skala bencananya pun sering dikategorikan bencana nasional.
- 2) Untuk memenuhi standar yang lain sesuai dengan yang ditetapkan oleh PKPU, maka sebaiknya ada tim rescue yang tetap sehingga tim ini bisa diberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan standar tersebut. Dengan adanya tim rescue yang terlatih dan berpengalaman dapat melaksanakan program tanggap bencana tersebut dengan baik dan sesuai dengan target awal.
- 3) Sebaiknya ada penambahan SDM di bidang pendayagunaan, karena dengan SDM yang ada hari ini tidak mampu ternyata mengelola dan melakukan pendampingan terhadap program yang telah dirancang. Kurangnya SDM juga membuat beberapa program yang awalnya direncanakan tidak terealisasi karena keterlambatan koordinasi.
- 4) Dengan besarnya kepercayaan donatur kepada PKPU Cabang Padang untuk mendonasi bantuannya bagi program bencana alam, maka sebaiknya PKPU juga membuat laporan evaluasi penggunaan donasi tersebut tidak hanya untuk donatur yang memberikan donasi yang dalam jumlah besar, tapi juga sebaiknya untuk donatur yang memberikan donasi dalam jumlah yang tidak terlalu besar.